PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 1988
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan Pembangunan di Daerah sebagai usaha untukmeningkatkan keserasian - dan keselarasan Pembangunan Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Kebumen dengan Pembangunan-Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional, maka diperlukan adanya Pola Dasar - Pembangunan Daerah yang dalam garis besarnya-berisikan Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan - Lima Tahun Kelima Daerah Tingkat II ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan pandangan-pandangan dan saran-saran dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Kebumen, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Daerah yang menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen.

Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1988 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang .....

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan - Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 - Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata-Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Tingkat II ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P 5 D) ;

6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2104/Bangda, tanggal 15 Nopember 1983 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Kebumen ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Pasal 1

(1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen adalah Garis-Garis -

Besar .....

Besar Kebijaksanaan dan Arah Pembangunan dalam rangka pengembangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat - II Kebumen dengan memperhatikan kondisi, potensi dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat - di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan sebagai Dasar Pembangunan selanjutnya.

(2) Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh, maka sistimatika Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Kebumen disusun sebagai beri - kut :

BAB I : PENDAHULUAN.
BAB II : POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH TING - KAT II JANGKA PANJANG.
BAB III : POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN - KELIMA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.
BAB IV : P E N U T U P.

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen - yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum tertampung dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya dapat diatur - dalam Peraturan Daerah lain.

Pasal 4

Program Pelaksanaan kebijaksanaan serta usaha-usaha Pembangunan Daerah akan dituangkan dalam Rencana - Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah dalam bentuk - Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 5 .....

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 30 Nopember 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

Ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Ttd.

H.M.C. TOHIR.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 1988
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM.

1. Dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten-Daerah Tingkat II Kebumen diperlukan adanya Pola Dasar - Pembangunan Daerah yang merupakan rangkaian kebijaksanaan Pembangunan Daerah disegala bidang, yang berlangsung terus menerus, dan pentahapannya disesuaikan dengan Repelita Nasional.

   Dengan demikian, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah tersebut merupakan landasan kebijaksanaan untuk menyusun - Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah.

2. Disamping itu Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen ini disusun untuk menjamin agar pembangunan di Daerah dapat berjalan dengan serasi dan - dapat tercapai keselarasan antara Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, Pembangunan Daerah - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) :

Sistimatika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen disusun berdasarkan Peraturan Menteri - Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah Jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik - Indonesia Nomor 050/2104/Bangda, tanggal 15 Nopember 1983 , perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah - Tingkat II.

Pasal 2

Cukup jelas .

Pasal 3 .....

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah yang berisikan-Program-program Pembangunan yang terdapat di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen yang disusun dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 5

Cukup jelas.

--------- 0 ---------

DOKUMENTASI HUKUM
KAB. DAERAH TK. II KEBUMEN

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

BAB I
PENDAHULUAN
A. PENGERTIAN

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Kebumen adalah Garis-Garis Besar Kebijaksanaan dan Arah Pembangunan dalam rangka Pengembangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan memperhatikan kondisi, potensi dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat dan sebagai dasar bagi pembangunan selanjutnya.
2. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen merupakan pedoman penyusunan kebijaksanaan dan program-program pembangunan disegala bidang dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Dati II Kebumen.

B. KEDUDUKAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan aspirasi masyarakat Kabupaten Dati II Kebumen dalam rangka Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara di Kabupaten Dati II Kebumen.

C. F U N G S I

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Daerah Kabupaten Dati II Kebumen dan merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Kebumen. Rencana Pembangunan Wilayah dan Penyusunan Rencana Kota untuk menciptakan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang berwawasan ketahanan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional.

D.Sifat .....

D. SIFAT/KARAKTERISTIK

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Kebumen merupakan penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan oleh karena itu sifatnya lebih konkrit dan lebih terperinci.
2. Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Kebumen memberikan pengaturan tata ruang wilayah/daerah sebagai wadah untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih baik, dalam rangka mengarah terwujudnya Kebumen BERIMAN (Bersih, Indah, Manfaat, Aman dan Nyaman).

E. RUANG LINGKUP

Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Kebumen meliputi seluruh aspek pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

F. S U S U N A N

Dengan tujuan agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Dati II Kebumen dalam waktu lima tahun berikutnya dan dalam jangka panjang, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Dati II Kebumen disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

1. Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang.
2. Pola Umum Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (Repelita-V) Daerah Tingkat II.

BAB II
POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II JANGKA PANJANG

A. PENDAHULUAN

1. Kemerdekaan yang dicapai berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan melalui perjuangan seluruh rakyat, telah memberikan kesempatan kepada Bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya, yakni suatu masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 hingga lahirnya Orde Baru, Kabupaten Dati II Kebumen selain pernah mengalami masa perjuangan fisik yang berat yang meminta banyak -

pengorbanan, dan pernah pula merasakan akibat-akibat gelombang pertentangan-pertentangan politik yang tajam dan rentetan pergolakan dan pemberontakan sampai dengan yang terakhir pemberontakan G.30.S/PKI pada tahun 1965. Berbagai peristiwa tersebut menimbulkan gangguan terhadap stabilitas daerah, sehingga usaha usaha untuk memerangi dan mengatasi kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan tidak dapat ditangani dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan kemerosotan diberbagai bidang yang menambah beban penderitaan rakyat lahir bathin.

3. Sejalan dengan keberhasilan perjuangan yang sungguh-sungguh dari Orde Baru dalam menciptakan stabilitas nasional, maka di Kabupaten Dati II Kebumen tercipta pula keadaan yang mantap untuk melanjutkan dan meningkatkan usaha pembangunan Daerah diberbagai bidang secara terus menerus, menyeluruh, terarah dan terpadu, bertahap dan berencana dengan tetap setia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Usaha Pembangunan Daerah harus benar-benar merupakan kelanjutan, peningkatan, perluasan dan pengembangan segala hasil pembangunan yang telah dicapai, dengan penekanan pada pengembangan kwalitas sumber daya manusia dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan selalu mengembangkan sikap realistik yang berpengharapan dan prinsip-prinsip sehat, mental, sehat pengelolaan, berdaya guna dan berhasil guna serta disiplin yang kuat.

5. Penyusunan kebijaksanaan dan program-program pembangunan serta pelaksanaan didasarkan atas Strategi Wawasan Identitas Kebumen dalam kerangka Wawasan Nusantara menuju kepada terwujudnya masyarakat dan wilayah yang berketahanan sebagai suatu kondisi dinas yang juga mampu mengatasi segala hambatan, rintangan, gangguan, ancaman dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar wilayah baik langsung maupun tidak langsung, dengan memperhatikan potensi-potensi alamiah maupun sosial, serta beraspirasi pada pengertian yang tersirat dalam Lambang Daerah Kabupaten Tingkat II Kebumen, yang mengandung aspek-aspek :

   a. Aspek filosofis dalam kehidupan rakyat, yaitu kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pengamalan dan Penghayatan Pancasila, Persatuan dan Kesatuan, Jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, keagungan, keabadian dan kemuliaan.

b. Aspek .....

b. Aspek perilaku keteladanan yang terdiri dari sikap-sikap kesatrian dan kepahlawanan, kejujuran dan kesucian, keluhuran keteguhan serta persatuan antara pemerintah dan rakyat.

c. Aspek-aspek fisik sebagai perwujudan (refleksi) dari aspek ideal dan perilaku yaitu yang banyak diwujudkan dalam kebudayaan dan kesenian yang khas daerah.

d. Aspek potensi kekayaan alam yang dapat diolah dan merupakan sumber penghasilan daerah yang terkandung di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

e. Aspek ruang dan kedudukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sebagai bagian dari Propinsi Dati I Jawa Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibatasi di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, di sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap dan Banyumas, di sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara dan Wonosobo serta di sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo.

6. Agar pelaksanaan pembangunan Daerah sebagai bagian dari pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional dapat berjalan lancar dan benar-benar mengarah kepada pencapaian tujuan, perlu disusun Pola Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Dati II Kebumen Jangka Panjang Tahap I yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 1969 dengan pelaksanaan Pelita Daerah/Modernisasi Desa tahap pertama.
Pelita Daerah/Modernisasi Desa Tahap Kedua, yang selanjutnya disusul dengan Pelita Daerah yang Ketiga, Keempat dan Kelima, sehingga merupakan rangkaian Pelita Daerah yang sambung menyambung dalam suatu kesatuan yang serasi.

7. Pola Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Jangka Panjang sebagai bagian dari usaha pengarahan dalam melaksanakan pembinaan dan pembangunan bangsa pada umumnya dan pembangunan Daerah Kabupaten Dati II Kebumen pada khususnya disusun berdasarkan pada landasan idiil Pancasila, landasan konstitusionil UUD 1945, landasan struktural UU.Nomor 5 Tahun 1974 dan UU Nomor 5 Tahun 1979 serta landasan operasional TAP MPR,Nomor 11/MPR/1988 dan Panca -

Krida .....

Krida Kabinet Pembangunan V, dengan memperhatikan ciri-ciri-utama daerah, masalah-masalah khusus, prioritas dan potensi-daerah.

8. Pola Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Jangka Panjang merupakan garis-garis besar rencana pembangunan Daerah yang memberikan kejelasan tujuan, arah dan kebijaksanaan pembangunan Daerah yang meliputi jangka waktu 25 sampai dengan 30 tahun dengan tujuan untuk memberikan pedoman, arahan dan bimbingan dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan keterpaduan pembangunan lima tahunan yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 1969.

B. KONDISI DAN POTENSI WILAYAH

Sesuai dengan modal dasar dan faktor-faktor dominan sebagaimana tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, maka kondisi dan potensi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang dapat didayagunakan untuk pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Letak geografis Kabupaten Dati II Kebumen terletak di Propinsi Dati I Jawa Tengah bagian selatan dan merupakan Daerah penghubung antara Daerah Jawa Timur dan Jawa Barat/Jakarta dengan lalu lintas yang cukup ramai.
   Kabupaten Dati II Kebumen terletak antara 109 ^{o} - 110 ^{o} Bujur Timur dan 7 ^{o} - 8 ^{o} Lintang Selatan, pada ketinggian 0 - 992,5 meter diatas permukaan laut.
   Kabupaten Dati II Kebumen dibatasi :
   - Disebelah utara oleh Kabupaten Dati II Wonosobo dan Banjarnegara.
   - Disebelah timur oleh Kabupaten Dati II Purworejo.
   - Disebelah selatan oleh Samudra Indonesia.
   - Disebelah barat oleh Kabupaten Dati II Banyumas dan Cilacap.

   Luas Kabupaten Dati II Kebumen adalah 128.111,50 Hektar dengan komposisi tanah menurut fungsinya adalah sebagai berikut :

- Tanah Sawah	; 39.802,00 Ha.	(31,07 %).
- Tanah Tegalan	: 31.796,00 Ha.	(24,82 %).
- Tanah Hutan	: 16.067,00 Ha.	(12,54 %).
- Tanah Pekarangan	: 33.967,00 Ha.	(26,51 %).
- Tanah Tambak	: 6 Ha.	(0,005 %).

Tanah .....

- Tanah Gembala : 63 Ha. (0,05 %).
- Lain-lain : 6,410,5 Ha. (5,005 %).

Kabupaten Dati II Kebumen memiliki iklim tropis, dengan musim penghujan dan musim kemarau yang selalu bergantian sepanjang tahun. Temperatur udara rata-rata 24,4 ° C. dengan kelembaban rata-rata 86,2 %.

Dari segi hidrologi mempunyai sumber-sumber air yang letaknya didaratan yaitu sungai : Menganti, Lowereng, Luk Ulo , Gentan, Gebang yang semuanya bermuara di pantai selatan - (Lautan Indonesia).

Disamping itu di Kabupaten Dati II Kebumen terdapat dua waduk yang mempunyai arti sangat penting bagi peningkatan - produksi hasil-hasil pertanian, yaitu waduk Wadas Lintang dan Waduk Sempor. Ditinjau dari segi geografis Kabupaten - Dati II Kebumen dapat dibagi sebagai berikut :

- Dataran rendah : terletak dibagian selatan, membujur dari arah Timur ke Barat.
- Dataran Tinggi : terletak dibagian utara dan tengah.
  Pegunungan dan perbukitan : terletak dibagian barat.daya.
- Daerah pantai : terletak dibagian selatan.

Daerah pantai selatan merupakan daerah yang indah, dengan-gua-gua yang merupakan obyek wisata yang masih perlu terus dikembangkan.

2. Sumber daya alam mencakup potensi biotik dan non biotik. Potensi biotik meliputi tanaman yang dibudidayakan seperti, hutan produksi, tanaman pertanian, tanaman pekarangan dan-sebagainya jenis hewan besar dan kecil, yang diternakan, - dan ikan yang dipelihara.

Potensi non biotik yaitu potensi yang bukan barang hidup seperti batu, pasir, dan lain-lain.

Dari segi Fisiografi, keadaan topografi Kabupaten Dati II - Kebumen berupa dataran rendah, dataran tinggi serta perbukitan dengan pegunungan yang landai hingga curam, dan daerah pantai. Di Kabupaten Dati II Kebumen yang luas wilayahnya - 128.111,50 hektar yang memiliki tingkat kesuburan berbeda - beda. Berbagai jenis tanah di Kabupaten Dati II Kebumen memungkinkan untuk budidaya pertanian, sehingga lebih dari - 68,48 % luas tanah digunakan sebagai lahan pertanian antara lain berupa sawah (31,07 %), tegal (24,82 %), tambak (- 0,005 %), hutan (12,54 %) dan tanah gembala (0,05 %).

Sumber-sumber air yang berupa air laut dan air di daratan -

yang meliputi .....

yang meliputi sungai-sungai,(Menganti, Lowereng, Luk Ulo, Gentan, Gebang) waduk (Wadas Lintang dan Sempor) dan air - dalam tanah dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, tenaga listrik dan sebagainya.

3. Penduduk Kabupaten Dati II Kebumen menurut hasil pencatatan tahun 1986 berjumlah 1.108.324 jiwa, terdiri dari 542.890- jiwa (48,98 %) laki-laki dan 565.434 jiwa (51,02 %) perempuan. Penduduk usia kerja (10 tahun ketas) berjumlah 819. 486 jiwa (73,94 %) dan penduduk usia produktif berjumlah - 595.240 jiwa (53,71 %). Angka rata-rata kepadatan penduduk sebesar 865 jiwa per kilometer persegi dengan kepadatan - tertinggi terdapat di Kecamatan Gombong yaitu 2.544 jiwa - per kilometer persegi dan kepadatan terendah di Kecamatan Karanggayam yaitu 443 jiwa per kilometer persegi. Dilihat dari penyebarannya pada desa dan Kota, maka kurang lebih - 93 persen penduduk tinggal di pedesaan, sedangkan yang 7 - persen ada di daerah perkotaan. Jumlah penduduk yang besar tersebut apabila memiliki kualitas dan dapat dibina sebaik baiknya akan merupakan modal utama yang sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang.

4. Keadaan sosial ekonomi yang telah dicapai oleh masyarakat Kabupaten Dati II Kebumen dalam perkembangan pelaksanaan - pembangunan di daerah, selain pencapaian swasembada pangan, juga tercermin dalam besarnya Produk Domestik Regional Bruto pada tahun 1986 sebesar Rp.207,33 milyar atau Rp.188. 125,09 perkapita menurut harga konstan tahun 1983. Apabila dinyatakan menurut harga yang berlaku, Produk Domestik Regional Bruto tersebut adalah sebesar Rp.265,19 milyar atau Rp.240.624,43 per kapita.

5. Karya-karya budaya di Kabupaten Dati II Kebumen baik yang- bersifat fisik maupun yang berisi ajaran-ajaran yang bersifat rokhaniah dan telah berkembang sepanjang sejarah, di - samping merupakan daya penggerak dalam memberikan corak - dan memperkaya kebudayaan, juga cukup besar sumbangannya - pada pembangunan peradaban bangsa.

6. Kepercayaan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semangat, kemauan dan kemampuan rakyat untuk terus melaksanakan pembangunan serta sifat-sifat kekeluargaan dan gotong-royong merupakan modal yang tak ternilai harganya dalam pembangunan di Daerah.

7. Keadaan .....

7. Keadaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang merupakan gambaran tentang Ketahanan Nasional di Kabupaten Dati II-Kebumen serta kekuatan sosial politik yang timbul dari - rakyat, bersama rakyat dan untuk rakyat sangat mendu kung dalam rangka mengisi kemerdekaan melalui usaha-usaha pembangunan di segala bidang.

C. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam usaha mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional di Daerah, maka tujuan pembangunan Kabupaten Dati II Kebumen adalah terciptanya wilayah dan masyarakat yang berketahanan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Dati II Kebumen tersebut akan dilanjutkan usaha-usaha untuk :

1. Memecahkan masalah-masalah pokok dan mendesak yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Dati II Kebumen untuk lebih-cepat mencapai tujuan pembangunan.
2. Menunjang, menerapkan dan melengkapi pelaksanaan Pembangunan Nasional di Daerah.

Untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, landasan dan asas-asas Pembanguanan Nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara menjadi landasan serta asas-asas Pembanguanan Daerah.

D. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG

Sejalan dengan arah Pembangunan Nasional Jangka Panjang, arah Pembangunan Daerah Jawa Tengah Jangka Panjang maka arah Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kabupaten Daerah Tingkat - II Kebumen adalah sebagai berikut :

U M U M

1. Pembangunan Daerah Tingkat II Kebumen sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dilaksanakan dalam rangka - pembangunan manusia seutuhnya dan Pembangunan seluruh/Indonesia yang dilaksanakan secara merata keseluruh wilayah./masyarakat.

2. Pembangunan .....

2. Pembangunan Daerah Tingkat II Kebumen sebagai bagian yang-tak terpisahkan dari Pembangunan Daerah Propinsi Daerah - Tingkat I Jawa Tengah yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila hanya akan tercapai apabila dijiwai hakekat ketaqwaan dan budi luhur manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, serta antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, dan keselarasan cita-cita hidup di dunia dan akhirat.

3. Pembangunan Daerah Tingkat II Kebumen yang dilandasi oleh-Strategi Wawasan Identitas Jawa Tengah dijabarkan secara - lengkap, terpadu, kompak dan berkesinambungan agar dapat mewujudkan Daerah Kabupaten Dati II Kebumen / sebagai Benteng Pancasila dan Basis Pembangunan serta Kabupaten Dati II Kebumen yang BERIMAN (Bersih, Indah, Manfaat, Aman dan Nyaman). / yang berketahanan menuju terwujudnya Kabupaten Dati II Kebumen.

4. Pembangunan Daerah Kabupaten Dati II Kebumen Jangka Panjang dilaksanakan secara bertahap dan setiap tahapan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat untuk - pembangunan tahap berikutnya. Titik berat pembangunan di - arahkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama tercapainya keseimbangan antara sektor pertanian dan sektor industri serta terpenuhinya kebutuhan dasar secara merata baik dipedesaan maupun di perkotaan. Sejalan dengan keberhasilan di bidang ekonomi akan terbuka kesempatan yang-lebih luas bagi pembangunan dibidang-bidang lainnya, terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

5. Pembangunan Daerah Tingkat II Kebumen Jangka Panjang diarahkan sebagai bagian nyata dari Pembangunan Daerah Propinsi - Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam menciptakan Stabilitas - Nasional yang sehat dan dinamis. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pembangunan Daerah dan Pembagian hasilnya tidak boleh menimbulkan kegoncangan sosial politik dan ekonomi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Stabilitas Nasional harus memperkuat Stabilitas Nasional di Daerah.

6. Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Jang Panjang diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas - daerah serta menjamin rasa keadilan sosial melalui pembagian pendapatan yang merata. Hal ini berarti bahwa pembangunan daerah harus dapat mencegah dan mengurangi melebarnya jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin dengan -

menumbuhkan .....

menumbuhkan pola hidup sederhana, wajar dan tenggang rasa kesetiakawanan sosial dalam rangka mencapai keadaan adil-dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

KEBIJAKSANAAN SEKTORAL

1. Kebijaksanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang diarahkan - untuk dapat menciptakan struktur ekonomi daerah, dimana sektor di luar pertanian secara bertahap harus mampu berperan sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Hal ini harus tercermin dalam nilai sumbangnya terhadap produksi daerah dan jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya di luar sektor pertanian.

2. Pembangunan Daerah Jangka Panjang menetapkan prioritas pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat yang semakin merata. Bersamaan dengan itu dilakukan upaya-upaya pengembangan kualitas manusia agar dapat meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Kebijaksanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, disamping-untuk meningkatkan produksi daerah, maka bersamaan dengan - itu harus dapat mempercepat pertumbuhan dan perluasan kesempatan kerja. Berkenan dengan itu perlu peningkatan mutu tenaga kerja yang membawa implikasi terhadap sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Disamping itu perlu pula pengaturan penawaran kerja sehingga terdapat keseimbangan antara pertumbuhan lapangan kerja disatu pihak dan - peningkatan partisipasi angkatan kerja di lain pihak.

4. Pembangunan Daerah yang dilaksanakan dengan memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya alam harus direncanakan sebaik - baiknya dengan tetap mengingat kebutuhan generasi yang akan datang. Dengan demikian pembangunan daerah harus berwawasan lingkungan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia dan merugikan generasi yang akan datang.

5. Pembangunan Daerah memerlukan inventasi yang terus meningkat dan harus dicukupi dengan memperhatikan kemampuan daerah sendiri dan kemampuan nasional. Untuk itu diperlukan dana tabungan masyarakat, tabungan pemerintah dan dana-dana - dari luar.

6. Pembangunan Ekonomi mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal,

penggunaan .....

penggunaan teknologi tepat guna, peningkatan kemampuan berorganisasi dan manajemen sehingga membawa manfaat bagi daerah serta dapat menjamin kelangsungan pembangunan. Pemanfaatan teknologi harus dapat meningkatkan produksi dan produktivitas tenaga kerja serta memperluas lapangan kerja.

7. Pembangunan Ekonomi dilaksanakan sesuai dengan Demokrasi Ekonomi yang berarti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan, sebaliknya Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim sehat bagi partisipasi masyarakat. Dalam pembangunan dengan Demokrasi Ekonomi sebagaimana dimaksud diatas, tidak tersedia tempat bagi sistem free fight liberalisme, etatisme maupun pemusatan dan monopoli- yang merugikan masyarakat.

8. Dalam rangka Pembangunan Daerah Jangka Panjang harus juga terkandung suatu perkembangan penalaran manusia serta perubahan sikap mental yang dapat mendorong pembangunan daerah. Berbagai upaya untuk membentuk dan mengarahkan mentalitas manusia yang mengandung serangkaian nilai-nilai budaya sangat diperlukan untuk membudayakan nilai-nilai baru yang sesuai dengan Pancasila, sehingga dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
   Pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai harus serasi dengan perubahan orientasi sosial masyarakat ke arah terwujudnya suatu mentalitas yang menunjang pembangunan daerah. Usaha-usaha peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia ke arah pembangunan masyarakat berbudaya dan berkualitas perlu lebih digalakkan dalam menghadapi dampak dari pembangunan daerah itu sendiri.

9. Dalam rangka Pembangunan Daerah, usaha-usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan keharusan. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan teknis dan pembinaan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan dan terwujudnya kreativitas dan otoaktivitas di kalangan rakyat. Dalam usaha tersebut tidak dapat dipisahkan peranan golongan ekonomi lemah, termasuk usaha kecil , tradisional dan informal yang jumlahnya cukup besar serta banyak mengalami berbagai hambatan usaha, perlu ditingkatkan melalui pola usaha bersama (Koperasi) agar lebih mampu bersaing baik dalam pemasaran, kualitas maupun pelayanan nya.

Kebijaksanaan .....

KEBIJAKSANAAN TATA RUANG DAERAH

Kebijaksanaan Tata Ruang Daerah lebih diarahkan guna mencapai optimasi pemanfaatan daerah yang didasarkan pada kondisi , potensi, permasalahan dan kegiatan di daerah yang ada dan diperkirakan akan berkembang. Kebijaksanaan tata ruang daerah juga diarahkan untuk mewujudkan pemerataan, pertumbuhan dan kestabilan. Disamping itu juga diarahkan dalam rangka mewujudkan pembangunan di daerah dalam sistem perwilayahan pembangunan untuk lebih mewujudkan keserasian pertumbuhan antar wilayah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas diperlukan pengamatan yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor geografis, sosiologis, ekonomis, budaya dan lingkungan hidup.
Kebijaksanaan Jangka Panjang diarahkan pada :

1. Pembangunan Desa dan Kota.
   Kebijaksanaan pembangunan Desa - Kota berdasarkan pada tingkat hubungan yang serasi antar desa dan kota sehingga merupakan satu kesatuan pengembangan yang perlu diwujudkan dalam pengembangan swadaya dan prakarsa masyarakat, serta merintis Kota Kebumen merupakan pusat informasi dan transit - Lariwisata.

2. Satuan Wilayah Pengembangan (swp).

   Kebijaksanaan pembangunan pada Satuan Wilayah Pengembangan berdasarkan kepada sistem pengembangan kegiatan pelayanan - yang bertumpu pada sumber daya alam dan manusia yang tersedia di daerah-daerah, dan juga mengarahkan pada peningkatan pemerataan, kemudahan serta untuk lebih menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan serta tetap mempertimbangkan kemampuan daerah dalam segala hal termasuk pembiayaan, maka kebijaksanaan perwilayahan pembangunan Kebumen akan meningkatkembangkan perwilayahan yang ada dengan mengembangkan :
   a. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) I, meliputi Kecamatan-Kebumen, Pejagoan sebagian Sruweng, Sadang, sebagian Bulusp esantren, Sebagian Klirong, sebagian Alian dengan - pusatnya di Kebumen.
      Sektor Utama : Perdagangan, Industri, Pertanian.

   b. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II, meliputi Kecamatan Kutawinangun, Ambal, sebagian Buluspesantren dan sebagian Alian dengan pusatnya di Kutawinangun.
      Sektor Utama : Pertanian, Perdagangan.

c. Satuan .....

c. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) III, meliputi Kecamatan Karanganyar, Karanggayam, Adimulyo dan sebagian Sruweng - dengan pusatnya di Karanganyar.
   Sektor Utama : Pertanian, Perdagangan.

d. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV, meliputi Kecamatan-Gombong, Sempor, sebagian Rowokele, Kuwarasan, Buayan dan sebagian Puring dengan pusatnya di Gombong.
   Sektor Utama : Pertanian, perdagangan, industri, wisata.

e. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) V, meliputi Kecamatan - Ayah dan sebagian Kecamatan Rowokele, dengan pusatnya di-Ayah.
   Sektor Utama : Perikanan, wisata, pertanian.

f. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) VI, meliputi Kecamatan Petanahan, sebagian Puring, sebagian Klirong dengan puaatnya di Petanahan.
   Sektor Utama : Pertanian, wisata dan perdagangan.

g. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) VII, meliputi Kecamatan Prembun, Mirid dengan pusatnya di Prembun.
   Sektor Utama : Pertanian, wisata dan perdagangan.

3. Kebijaksanaan pembangunan wilayah daerah Aliran Sungai(DAS) berdasarkan atas sistem keterpaduan kegiatan antar sektor - yang mengarah kepada peningkatan, perlindungan, rehabilitasi, pemeliharaan, pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup di Daerah Aliran Sungai (DAS).

E. CATATAN DASAR

Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang ini merupakan landasan pokok bagi Penyusunan Pola Umum Pembangunan Daerah - Jangka Menengah yaitu Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Daerah yang merupakan dasar penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.

BAB III
POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

A. PENDAHULUAN

1. Kaitan Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang dengan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat II.

a.Pelaksanaan .....

a. Pelaksanaan Pelita Pertama, Pelita Kedua, Pelita Ketiga dan Pelita Keempat Daerah Tingkat II Kebumen telah mencapai hasil yang positif, yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat, yaitu :

1). Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat Kabupaten Dati II Kebumen yang semakin merata.

2). Terpecahkannya masalah-masalah yang pokok dan mendesak secara bertahap dengan memperhatikan peningkatan dan pendayagunaan potensi-potensi yang ada, serta memperhatikan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan hidup.

Hasil-hasil tersebut dapat dicapai antara lain karena telah adanya arahan umum, dasar-dasar dan pokok kebijaksanaan dari Propinsi Dati I Jawa Tengah tentang Pola Pelita yang berlaku juga di Kabupaten Dati II Kebumen yaitu :

1). Pola Pelita Pertama dan Kedua : Modernisasi Desa.

2). Pola Pelita Ketiga : Benteng Pancasila dan Basis Pembangunan.

3). Pola Pelita Keempat : Strategi Pembangunan Daerah yang berwawasan jati diri (Strategi Wawasan Identitas Jawa Tengah).

Dengan hasil-hasil tersebut terciptalah kerangka landasan yang memungkinkan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen untuk melanjutkan pembangunan, terus tumbuh dan berkembang dalam Pelita Kelima sebagai pelaksanaan tahap Kelima dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang.

Pola Umum Pelita Kelima Daerah yang meliputi jangka waktu 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 adalah Rencana Pembangunan yang disusun berlandaskan pada dan merupakan kesinambungan dari Pelita-Pelita sebelumnya, sehingga selain merupakan kelanjutan juga sekaligus peningkatan, perluasan dan pengembangan segala hasil pembangunan yang telah dicapai di semua sektor pembangunan.

Dengan demikian diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan dan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang 25 tahun yang pertama sebagaimana ditetapkan dalam Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang.

Dalam Pelita Kelima diusahakan terciptanya landasan yang mantap bagi masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen untuk benar-benar dapat tinggal landas pada Pelita Keenam dan

memacu .....

memacu pembangunan menuju tercapainya tujuan pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Panca - sila.

Pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada Strategi Wawasan - Identitas.

Selanjutnya dalam Pelita Kelima akan diusahakan peningkatan - kualitas pengelolaan pembangunan dan pembangunan yang lebih - berorientasi pada pembangunan pedesaan dengan tetap bertumpu- pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi - yang cukup tinggi serta Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.

b. Masalah-masalah Pokok.

Masalah-masalah pokok yang dihadai dan belum sepenuhnya dapat diselesaikan dalam Pelita-Pelita yang lalu adalah :

1). Kependudukan.

- Laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi (1,24% per tahun) dan penyebaran yang tidak merata.
- Masih rendahnya kualitas penduduk terutama tenaga kerja, - antara lain tahun 1986 dari jumlah penduduk yang berpendidikan SD dan tidak sekolah mencapai sejumlah 76,80%.
- Pertumbuhan angkatan kerja yang belun diimbangi dengan kessempatan kerja yang tersedia, dimana pada tahun 1986 masih terdapat pengangguran sebesar 5,73%.
- Masih rendahnya pendapatan masyarakat dan belum meratanya- pembagian pendapatan, yaitu pada tahun 1986 berdasarkan - harga konstan 01983) sebesar Rp.188.125,09 besarnya pendapatan per kapita, sedang pemerataan pembagian pendapatan - ada pada tingkat sedang.
- Sebagian besar (54,24%) penduduk menggantungkan hidupnya - dari sektor pertanian, sedangkan luas rata-rata pemilikanlahan pertanian kurang dari 0,500 hektar.
- Tidak meratanya mobilitas penduduk antar wilayah.

2). Keseimbangan Lingkungan dan Kelestarian Alam.

- Terganggunya keseimbangan lingkungan hidup yang mengancam kelestarian sumber alam dan kualitas lingkungan.
- Belum tercapai pendayagunaan sumber-sumber air, tanah dan ruang untuk lebih meningkatkan daya dukung wilayah yang - terbatas.

3).Pendidikan .....

3). Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang se-tinggi-2 nya belum dapat dirasakan secara merata.
- Mutu dan kesesuaian pendidikan yang belum memenuhi kebutuhan pembangunan Daerah serta keterbatasan dalam sarana dan prasarana.
- Pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum optimal dan pengembangan sistem informasi yang belum memadai.

4). Laju Pertumbuhan Antar Daerah.
- Perbedaan laju pertumbuhan daerah sebagai akibat perbedaan penyebaran penduduk, kegiatan ekonomi dan potensi yang tersedia serta perbedaan peluang dan kemungkinan pengembangan.
- Kondisi sarana dan prasarana ekonomi dan non ekonomi didaerah yang belum memadai.

5). Aparatur Pemerintah.
- Kemampuan Aparatur Pemerintah yang belum memadai yang selalu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan masyarakat, untuk memenuhi tuntutan kemajuan pembangunan.
- Belum tercapainya pemantapan dan pengembangan organisasi, peningkatan tugas dan fungsi, pembinaan dan penyediaan personil dan tata laksana kerja.
- Keterbatasan sarana dan prasarana Aparatur Pemerintah.

6). Penghijauan.
- Penghijauan di daerah tangkapan air di waduk Sempor, Bendungan-bendungan, Dam-dam Pengendali dan penghijauan Pantai.
- Pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan lahan kering dan berfungsi sebagai pencegah erosi, mengurangi sedimentasi dan bisa meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.

2. Penerapan Kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Kabupaten Dat II Kebumen.

Pada hakekatnya pembangunan Daerah Kabupaten Dati II Kebumen merpakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional, sehingga pelaksanaannya harus merupakan penetapan, penunjang serta pelengkap dari pelaksanaan Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional dalam rangka-

mewujudkan .....

mewujudkan tujuannya yaitu masyarakat adil dam makmur yang - merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila.
Keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai upaya pengamalan dari semua sila dalam Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh yang meliputi :

a. Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang antara lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan ber - agama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan moral, etik dan spiritual yang kokoh bagi pembangunan Daerah sebagai pengamalan Pancasila.

b. Pengamalan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap., yang antara lain mencakup peningkatan penghormatan terhadap - martabat serta hak dan kewajiban warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan dan ketidak adilan dari-muka bumi.

c. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia, yang antara lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga makin kuat rasa kesetiakawanan dan kebersamaan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Pengamalan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang antara - lain mencakup makin menumbuh dan mengembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, pengembangan kesadaran dan tanggung jawab politik warga negara serta bergairahnya - rakyat dalam proses politik.

e. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembang - kan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju - kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Oleh karena itu pembangunam Daerah Kabupaten Dati II Kebumen dalam Pelita Kelima harus dilaksanakan searah, sejalan , serasi dan seimbang. dengan Pembangunan Propinsi Dati I Jawa-Tengah dan Pembangunan Nasional, yaitu makin meningkatkan -

usaha-usaha .....

usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian pendapatan yang makin merata dan lebih memperluas - kesempatan kerja serta memecahkan masalah-masalah yang belum sepenuhnya ditangani dalam Pelita-Pelita yang lalu. Sejalan - dengan hal itu dalam Pelita kelima akan dimantapkan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas pembangunan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan yang menjamin pembangunan yang berkelanjutan serta pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan perekayasaan sosial. Dalam pada itu orientasi pembangunan akan lebih diarahkan pada pembangunan pedesaan.

B. TUJUAN

Dalam rangka pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Daerah - Jangka Panjang maka tujuan Pelita Kelima Daerah adalah :

1. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin adil dan merata dengan memanfaatkan - secara optimal sumber daya alam dan sumber daya manusia serta penataan ruang yang serasi.

2. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya dengan lebih menekankan pada :

   a. Pertumbuhan ekonomi yang makin mantap dengan tergalang - nya kekuatan dan ketahanan ekonomi serta meningkatkan - produktivitas total wilayah dan inventasi yang lebih produktif, pemupukan modal masyarakat, dunia usaha swasta - dan koperasi.

   b. Pelaksanaan Demokrasi Ekonomi dimana Pemerintah lebih - berfungsi membina dan mengayomi guna memberikan kesempatan kepada Dunia Usaha Nasional agar lebih berperan melalui penciptaan iklim usaha dan iklim inventasi yang mantap.

   c. Peningkatan kualitas manusia yang meliputi ketaqwaan,kemampuan, ketrampilan, pengetahuan masyarakat dan kemampuan alih teknologi dalam upaya peningkatan kualitas kekaryaan, kewaspadaan dan kemandirian serta meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

   d. Pengembangan budaya politik Pancasila dengan memantapkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila yang tercermin da - lam keseluruhan semangat dan gerak pembangunan yang dilakukan oleh seluruh kekuatan sosial politik.

e.Peningkatan .....

e. Peningkatan kemampuan menangkal bentuk-bentuk hambatan, ancaman, tantangan dan gangguan serta mantapnya kewaspadaan - Nasional di Daerah dan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Kemudian dalam rangka mencapai tujuan dimaksud akan dilanjutkan usaha-usaha pemecahan masalah-masalah pokok dan mendesak yang belum terselesaikan dalam Pelita Keempat dengan memperhatikan peningkatan dan pendayagunaan potensi sumber daya alam maupun manusia dengan tetap memperhatikan dengan keseimbangan - dan kelestariannya.

C. ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Dalam rangka pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang, maka arah dan kebijaksanaannya pembangunan dalam Pelita Kelima Daerah ialah :

U M U M

1. Melanjutkan dan meningkatkan arah dan kebijaksanaan Pembangunan selama Pelita Keempat sehingga terjalin kesinambungan - program pembangunan Daerah Kabupaten Dati II Kebumen dan semakin nyata dapat dirasakan sebagai peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan rakyat yang mencerminkan meningkatnya kualitas manusia dan kualitas kehidupan masyarakat yang dapat memperkokoh ketahanan Nasional di Daerah, dengan berlandaskan - pada Strategi Wawasan Identitas dalam kerangka Wawasan Nusantara.

2. Memantapkan Stabilitas politik di daerah, dengan meningkatkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila, serta mengusahakan makin kokohnya Persatuan dan kesatuan Nasional di daerah, melalui peningkatan kehidupan rakyat secara konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum yang selalu ditingkatkan dan dibina terus menerus.

   Sejalan dengan itu demi tegak tumbuhnya kehidupan konstitusional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 - maka kekuatan sosial politik khususnya Parpol dan Golkar, - yang telah berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas: semakin mampu, mandiri dan mantap dalam membangkitkan peranan- seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, - berbangsa dan bernegara.

3. Meningkatkan kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam usaha mengayomi masyarakat -

supaya .....

supaya hidup tentram lahir batin dalam pelaksanaan pembangu nan yang merupakan syarat bagi terciptanya stabilitas.
Usaha-usaha ini akan mendorong makin berkembangnya kreatifi tas masyarakat, meningkatkan kegairahan hidup, memantapkan- dan memperluas partisipasi rakyat dalam pelaksanaan pemba - ngunan.
Untuk itu maka Aparatur Pemerintah di Daerah pada umumnya - dan Aparatur Penegak Hukum khususnya perlu terus menerus di bina dan didayagunakan dalam melaksanakan tugas dan kewaji- ban dan usaha menciptakan Aparatur Pemerintah dan Aparatur- Penegak Hukum yang bersih dan berwibawa.

4. Memelihara dan meningkatkan keamanan dan ketertiban umum un tuk menjamin Stabilitas Nasional di daerah dan kelancaran - pelaksanaan rencana Pembangunan di Daerah. Untuk itu kesia- pan, kewaspadaan dan ketrampilan aparat keamanan terus di - tingkatkan disamping usaha-usaha pembinaan kesadaran dan ra sa tanggung jawab masyarakat terhadap keamanan dan keterti- ban.

5. Memantapkan stabilitas ekonomi dengan melanjutkan kebijaksa naan ekonomi yang selama ini berhasil baik sehingga barang- barang kebutuhan pokok sehari-hari cukup tersedia dan terse bar dengan harga terjangkau oleh masyarakat banyak.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup mantap dalam- Pelita Kelima Daerah harus dapat dicapai kenaikkan produksi barang dan jasa diperbagai sektor yang meliputi : pertanian, perdagangan, pariwisata, jasa-jasa dan lain-lain sehingga - memberi sumbangan baik dari segi nilai tambah maupun penciptaan lapangan kerja.Hal itu perlu diusahakan dengan mening- katkan pengerahan dan pendayagunaan sumber daya dan dana ,- pengembangan kelembagaan termasuk didalamnya peningkatan - konsolidasi tataniaga, pendayagunaan teknologi tepat guna, serta perluasan kesempatan berusaha.

6. Pelaksanaan Pelita Kelima memerlukan pembiayaan yang memadai baik dari sumber pemerintah maupun masyarakat dengan mengem bangkan sumber-sumber dana pembangunan yang ada untuk lebih mewujudkan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab serta mendorong kegiatan investasi bagi sektor swasta. Peng gunaan dana pembangunan dan investasi harus diarahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang benar-benar merupakan pri- oritas serta lebih ditingkatkan dayaguna dan hasilgunanya.

7.Penciptaan .....

7. Penciptaan lapangan kerja perlu ditingkatkan dan dimantapkan melalui langkah-langkah pembangunan yang menyeluruh dan terpadu, baik langkah-langkah yang bersifat umum, sektoral,regional maupun khusus. Langkag-langkah yangtbersifat umum meliputi kebijaksanaan dalam produksi, investasi, perdagangan, harga, upah dan lain-lain serta berbagai kegiatan di bidang pendidikan dan latihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Langkah-langkah yang bersifat sektoral antara lain meliputi kebijaksanaan pembangunan disektor-sektor pertanian, industri jasa dan lain-lain yang berorientasi kepada perluasan kesempatan kerja. Langkah-langkah yang bersifat regional meliputi upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah serta pengembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat lebih memanfaatkan seluruh potensi pembangunan ditiap-tiap daerah.Langkah-langkah yang bersifat khusus meliputi berbagai kegiatan pemberian bantuan pembangunan, kegiatan padat karya dan lain - lain.

8. Kebijaksanaan perluasan dan pemerataan kesempatan kerja diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan terciptanya angkatan kaerja yang mampu dan siap bekerja sehingga dapat mengisi semua jenis dan tingkat lapangan kerja dalam pembangunan di daerah. Dalam rangka pemerataan lapangan kerja perlu ditingkatkan berbagai langkah yang meliputi antara lain pendayagunaan angkatan kerja, pembinaan golongan ekonomi lemah termasuk usaha kecil, tradisional dan informal yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.

9. Pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan untuk memajukan kecerdasan, ketrampilan dan kesejahteraan seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya serta untuk memantapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

10. Dalam rangka memeratakan pembangunan di daerah perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah dan antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Koordinasi fungsional perwilayahan perlu untuk ditingkatkan dalam rangka pemantapan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah yang berbatasan.

11. Untuk .....

11. Untuk dapat mencapai sasaran-sasaran Pembangunan dalam Pelita V perlu dipelihara dan dikembangkan partisipasi masyarakat serta peningkatan peranan Lembaga Swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang terpadu didalam sistem pengembangan dan pendayagunaan Aparatur Pemerintah dalam bidang-bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Daerah.

12. Dalam rangka pemerataan hasil-hasil pembangunan perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup kelompok-kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, seperti buruh tani, petani penggarap yang tidak memiliki lahan , petani berlahan sempit, pengrajin dan lain-lainnya. Kebijaksanaan yang memberi kesempatan lebih banyak kepada golongan ekonomi lemah termasuk usaha kecil tradisional dan informal perlu dilanjutkan dan ditingkatkan dengan memberikan kepastian usaha, memperkuat permodalan, bimbingan teknologi, peningkatan ketrampilan dan kesempatan berusaha serta memperluas pemasaran.

13. Pendayagunaan dan pemanfaatan tanah perlu ditingkatkan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Untuk itu perlu dikembangkan perencanaan tata ruang dan tata guna tanah, sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan sehingga dapat menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Disamping itu perlu dilanjutkan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah termasuk pengalihan hak atas tanah..

14. Jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan yang tinggi merupakan masalah yang perlu diatasi karena dapat merupakan beban bagi pembangunan dan mengurangi hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat. Untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk sekaligus mendayagunakan jumlah penduduk yang besar bagi peningkatan pembangunan disegala bidang, langkah-langkah dibidang kependudukan perlu ditingkatkan dan dilaksanakan secara lebih terpadu.

15. Dengan makin meningkat dan kompleknya pembangunan perlu makin ditingkatkan kemampuan perencanaan, pengawasan dan pengendalian yang dilandasi oleh disiplin serta rasa -

tanggung .....

tanggung jawab dan semangat pembangunan yang tinggi sehingga benar-benar dapat dicapai efisiensi dalam pembangunan.

ARAH DAN KEBIJAKSANAAN SEKTORAL EKONOMI

1. Pertanian.

Pembangunan pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan diarahkan pada berkembang aya pertanian yang maju, efisien - dan tangguh yang mampu secara nyata meningkatkan kesejahteraan petani khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pembangunan pertanian bertujuan meningkatkan mutu dan produksi pertanian, melestarikan produksi dan sumber hayati pertanian , serta mengembangkan usaha tani terpadu guna memantapkan swasembada pangan, melalui kebutuhan gizi masyarakat, meningkatkan komiditi eksport, komiditi bahan baku industri dalam negeri, hasil hutan dan ikutannya, meningkatkan taraf hidup petani, mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta mendorong peran serta swasta dalam upaya mengembangkan potensi pertanian. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilanjutkan dan ditingkatkan usaha-usaha optimasi pendayagunaan lahan dengan pengusahaan - berbagai macam tanaman/komiditi pangan, perkebunan dan kehutanan, berbagai usaha peternakan dan perikanan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, deversifikasi dan rehabilitasi. Meningkatkan kemampuan pengusahaan dan pengelolaan serta penerapan teknologi yang tepat pada usaha-usaha pertanian serta pendayagunaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah - Samudra Indonesia serta upaya pendayagunaan potensi dan sumber daya laut, dan wilayah pantai yang perlu dilaksanakan - secara terpadu, serasi, dan merata sesuai kondisi tanah, - air dan iklim dengan tetap memelihara kelestarian sumber - alam dan lingkungan hidup.

2. Pengairan.

Pembangunan pengairan dilanjutkan dan ditingkatkan dengan diarahkan untuk menyediakan air irigasi yang cukup bagi peningkatan produksi pertanian, pengamanan wilayah produksi dari kerusakan akibat banjir, sekaligus memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat, industri serta kelistrikan dan - pemanfaatan air yang seefisien mungkin.

Sehubungan .....

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilestarikan sumber-sumber air, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi prasarana , dan sarana pengairan, perbaikan dan pengaturan sungai. Dalam upaya peningkatan pemanfaatan jaringan irigasi yang ada akan dikembangkan dan ditingkatkan peran serta Kelompok Tani Pemakai Air " Dharma Tirta " sejak tingkat perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaannya. Demikian pula akan selalu ditingkatkan penyuluhan, penyampaian informasi, pendidikan dan latihan baik kepada petugas maupun petani dibidang - pengairan.

3. Industri.

Pembangunan industri diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi yang seimbang antara industri menengah, kecil / Rumah Tangga dan pertanian, dengan penekanan pada pengembangan industri yang sejauh mungkin diarahkan untuk pendalaman dan pemantapan struktur industri baik antara industri besar, sedang dan kecil maupun antara industri hulu dengan industri hilir. Berkembangnya industri sebagai penggerak utama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha untuk peningkatan devisa dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungannya. Diupayakan pula melalui pengembangan keterkaitan antara pengembangan sektor industri dengan sektor lain.

4. Pertambangan.

Pembangunan pertambangan diarahkan khususnya kepada peningkatan usaha-usaha penelitian, pemetaan, Inventarisasi , eksplorasi dan eksploatasi, bahan tambang dan galian yang potensial, dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, serta pengembangan perangkat, lunak dan keras yang diperlukan, dengan tujuan untuk meningkatkan investasi usaha pertambangan dan partisipasi swasta nasional. Sedangkan eksplorasi potensi pertambangan diarahkan pula selalu terjaganya kelestarian lingkungannya.

5. Energi.

Pembangunan tenaga listrik baik dalam pembangkitan, transmisi maupun distribusinya serta diversifikasi dan sumber - energi lainnya diarahkan untuk mendorong kegiatan ekonomi - (industri dan pertanian) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di daerah pedesaan maupun perkotaan dan -

diupayakan .....

diupayakan pemantapan sumber-sumber energi oleh masyarakat , agar tidak boros terutama sumber-sumber energi yang terbatas adanya.

6. Perhubungan.

Pembangunan perhubungan diarahkan untuk lebih memperlancar arus barang, jasa dan informasi serta meningkatkan mobilitas manusia keseluruh daerah, sehingga tercapai tingkat kemudahan yang merata dan akan memperlancar roda perekonomian serta menunjang tercapainya sasaran-sasaran pembangunan daerah.

7. Pariwisata.

Pembangunan pariwisata (Pusat Informasi dan transit Pariwisata) diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, taraf hidup masyarakat dan mendorong pembangunan daerah dengan lebih meningkatkan peran masyarakat, dunia usaha untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha terutama masyarakat setempat, serta tetap terpeliharanya kepribadian dan kebudayaan daerah, memupuk rasa cinta tanah air serta melestarikan alam dan lingkungan.

8. Perdagangan.

Pembangunan perdagangan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran, memperlancar arus barang dan jasa dalam lingkup dalam negeri, dan luar negeri terutama eksport non-migas. Dalam pada itu ditingkatkan pembinaan komiditi terutama yang mempunyai prospek pasaran diluar negeri dan daya-saing komiditi khususnya komiditi pertanian melalui peningkatan efisiensi produksi, pemasaran, mutu, lingkungan, informasi perdagangan sarana dan prasarana perdagangan, serta usaha pembinaan golongan ekonomi lemah termasuk usaha kecil tradisional dan informal.

9. Koperasi.

Pembangunan Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berwatak sosial harus semakin dikembangkan dan diperkuat khususnya dalam bidang organisasi, manajemen usaha dalam rangka menumbuhkan Demokrasi Ekonomi sebagai salah satu landasan bagi tercapainya masyarakat yang berkeadilan sosial. Disamping itu juga diarahkan untuk mengembangkan peranan Koperasi agar perperan lebih besar diberbagai sektor produksi, seperti Pertanian, Perindustrian, Konstruksi -

Perdagangan .....

Perdagangan, Keuangan, Angkutan, Kelistrikan dan Pariwisata serta meningkatkan kemampuan dan peranan Koperasi fungsional, meliputi Koperasi Karyawan, Pegawai Negeri, ABRI, Pemuda, dan Mahasiswa agar tumbuh semakin kuat dan mandiri.

10. Dunia Usaha Nasional.

Pembangunan Dunia Usaha di Daerah diarahkan dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan per kapita dan pemerataan pendapatan, serta perluasan kesempatan berusaha dan peningkatan ekspor non migas dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya yang ada dan mendorong serta merangsang pertumbuhan dunia usaha Nasional baik usaha swasta, usaha negara maupun Koperasi Golongan Ekonomi lemah termasuk usaha kecil, tradisional dan informal yang tidak saja besar dalam jumlah tetapi juga dalam keterbatasannya, perlu ditingkatkan pada usaha bersama melalui Koperasi agar lebih mampu bersaing baik dalam pemasaran, kualitas maupun pelayanan.

11. Tenaga Kerja.

Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan untuk memperluas dan memeratakan kesempatan kerja melalui peningkatan mutu ketrampilan dan kemampuan serta perlindungan terhadap tenaga kerja yang sesuai hubungan kerja Pancasila.

12. Transmigrasi.

Pembangunan Transmigrasi diarahkan untuk mengurangi kepadatan penduduk terutama didaerah rawan, dan padat penduduk, untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan mobilitas usaha penduduk.

13. Pembangunan Daerah, Desa dan Kota.

Pemerataan pembangunan di daerah perlu dilanjutkan dan ditingkatkan dengan memperhatikan keseimbangan antara-daerah yang lebih maju, kurang maju dan daerah minus. Pembangunan tersebut diarahkan untuk menanggulangi masalah masalah yang sangat mendesak antara lain : Perluasan Kesempatan kerja, pembinaan dan pengembangan lingkungan pedesaan dan perkotaan serta meningkatkan kemampuan penduduk untuk-dapat memanfaatkan sumber-sumber alam serta melalui pendekatan pengembangan wilayah dengan memperhatikan pengaturan penggunaan tanah, pengaturan kegiatan antar daerah -

keseimbangan daerah pedesaan dan perkotaan serta pengaturan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Dalam hubungan ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan kebijaksanaan pengembangan wilayah pedesaan maupun perkotaan. Khusus wilayah pedesaan diarahkan untuk peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan serta kualitas hidup terutama bagi golongan penduduk pedesaan yang miskin, potensial, produktif dengan peningkatan potensi kota kecamatan dan desa-desa pusat pertumbuhan guna mendorong pertumbuhan desa-desa sekitarnya. Pengembangan sumber daya yang ada diarahkan untuk menunjang Pembangunan yang berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan produktifitas penduduk diwilayah yang perlu dilaksanakan secara terpadu, serasi dan merata dengan tetap memelihara kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup. sesuai kondisi dan potensi sumber daya yang ada.

14. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

Pengolahan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup diarahkan untuk melestarikan fungsi-fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam suatu keseimbangan yang dinamis agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat baik bagi masa kini maupun bagi generasi mendatang. Disamping itu dikembangkan pula kesadaran lingkungan dengan mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam memelihara, melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup serta akan tetap diupayakan pembangunan berwawasan lingkungan yaitu dengan jalan mengintegrasikan dimensi lingkungan kedalam program-program pembangunan.

AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA. SOSIAL DAN BUDAYA

1. Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila menuju terbentuknya manusia-manusia pembangunan yang taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta terhadap negara, bangsa dan tanah air yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta keserasian antara pembangunan fisik material dan mental spiritual. Untuk itu, kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

akan terus .....

akan terus dikembangkan, dengan menciptakan iklim yang memungkinkan peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terbina hidup rukun diantara sesama umat beragama, diantara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan diantaranya sesama umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal dan keikutsertaannya dalam pembangunan di daerah.
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan :

- Agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru.
- Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab.

2. Pendidikan.

a. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yaitu perwujudan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan trampil serta sehat jasmani dan rokhani.
Pendidikan Nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu dikembangkan iklim belajar dan mengajar-yang dapat menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif.
Dengan demikian pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

b. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan didalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, oleh karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

c. Pembangunan .....

c. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk :

1). Meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah tingkat pertama dalam rangka mempersiapkan tenaga-tenaga kerja yang berkualitas. /kejuangan khususnya nilai-nilai

2). Melanjutkan dan meningkatkan pendidikan Pancasila termasuk pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan, memupuk dan mengembangkan jiwa, semangat dan - nilai-nilai/1945, kepada generasi muda disemua jenis - dan jenjang pendidikan formal, non formal di masyarakat.

3). Memperluas kesempatan belajar dan kesempatan memperoleh ketrampilan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, penyandang cacat atau bertempat tinggal di daerah terpencil. Perhatian khusus perlu diberikan kepada- anak berprestasi agar mereka dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya lebih baik.

4). Meningkatkan dan memperluas pendidikan luar sekolah/non formal yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan , seperti kepramukaan dalam rangka mengembangkan minat , bakat serta memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja. Dalam hal ini- perlu lebih ditingkatkan partisipasi Lembaga-lembaga - swadaya masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

5). Meningkatkan partisipasi perguruan tinggi dan lembaga - penelitian dalam menunjang keberhasilan pembangunan di daerah.

6). Meningkatkan dan mendayagunakan prasarana dan sarana - pendidikan disemua jenjang pendidikan formal dan pendidikan non formal/masyarakat.

3. Generasi Muda dan Olah Raga.

a. Pembinaan dan pengembangan generasi muda, sebagai sumber daya manusia yang potensial bagi pembangunan daerah dan - nasional serta sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, perlu ditingkatkan terus dan diarahkan untuk menjadi kader penerus perjuangan bangsa dan manusia pembangunan - yang berjiwa Pancasila.

b. Pembinaan .....

b. Pembinaan dan pengembangan generasi muda dilakukan sedini mungkin mulai tahap-tahap pertumbuhan sebagai anak, remaja dan pemuda.

c. Pembinaan dan pengembangan generasi muda menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat, lingkungan pemuda dan pemerintah.

d. Pembinaan dan pengembangan generasi muda ditujukan untuk meningkatkan kualitas generasi muda dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya utama dalam pembangunan.

e. Pembinaan dan pengembangan generasi muda diusahakan antara lain melalui upaya-upaya untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan dan menumbuhkan kesadaran berbangsa, bernegara, mempertebal idealisme, patriolisme dan harga diri, memperluas wawasan kemasa depan, memperkokoh kepribadian dan berdisiplin, mempertinggi budi pekerti, memupuk kesegaran jasmani dan daya kreasi, mengembangkan kemandirian, kepemimpinan, ilmu, ketrampilan, semangat kerja keras dan kepeloporan serta mendorong partisipasi mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta pembangunan daerah dan nasional.

f. Pembinaan dan pengembangan generasi muda diarahkan untuk membentuk pemuda yang mampu menjadi kader yang tangguh serta memiliki wawasan kebangsaan yang luas dan utuh dan dapat membantu usaha mengatasi masalah/tenaga kerja dan pendidikan. /sebagai tantangan dan masalah pembangunan seperti masalah

g. Pembinaan dan pengembangan generasi muda diarahkan untuk menumbuhkan, memupuk dan mengembangkan rasa tanggung jawab mereka terhadap pembangunan daerah dan nasional serta masa depan bangsa.

h. Pendidikan politik dalam rangka lebih memantapkan perwujudan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara makin ditingkatkan guna mempertebal kesadaran pemuda sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap kehidupan masa depan bangsa dan negara.

i. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olah raga untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rokhani seluruh masyarakat, dalam rangka pemupukan watak, meningkatkan disiplin dan sportivitas serta pengembangan prestasi olah raga dan peningkatan kualitas manusia Indonesia.

j. Pembinaan .....

j. Pembinaan dan pengembangan generasi muda dilakukan dengan - mengembangkan suasana kepemudaan yang sehat dan tanggap ter hadap tantangan pembangunan masa depan sehingga akan mening katkan kegiatan kepemudaan yang berdayaguna dan berhasil gu na.

4. Kebudayaan.

a. Kebudayaan daerah sebagai salah satu identitas daerah - yang merupakan bagian dan sekaligus sebagai penunjang ke budayaan nasional adalah modal dasar dalam pembangunan - daerah.

b. Pembangunan kebudayaan daerah diusahakan melalui penggalian, pemeliharaan, pemupukan,pengembangan dan penyelama tan kebudayaan daerah dan diarahkan untuk pengembangan - dan peningkatan segala kehidupan baik bidang ekonomi, so sial budaya maupun politik, guna :

1). Meningkatkan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila,- meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal dan memantapkan rasa harga diri dan kebangsaan nasional, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak - bagi perwujudan cita-cita bangsa dimasa depan.

2). Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengangkat- dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya daerah- yang luhur menyerap nilai-nilai luhur dari luar yang positif bagi pembangunan daerah dan menangkal nilai nilai budaya dari luar yang negatif.

3). Menciptakan suasana yang mendorong tumbuh dan berkem bangnya rasa tanggung jawab dan kesetiakawanan sosi al, disiplin nasional serta sikap budaya yang mampu menjawab tantangan-tantangan pembangunan seperti si kap mandiri dalam kebersamaan, tenggang rasa, musya warah untuk mufakat, berwawasan masa depan, kerja - keras, jujur dan kesatria, hemat, cermat, sederhana, tertib, menghargai waktu serta penuh pengabdian.

4). Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pemasyara- katan bahasa Indonesia serta penggunaannya secara - baik dan benar.

5). Membina, melestarikan dan mengembangkan bahasa dae- rah (bahasa jawa) dalam rangka mengembangkan dan - memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan kha- sanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur

kepribadian bangsa. Bahasa Daerah perlu terus dipelihara agar tetap mampu menjadi ungkapan budaya masyarakat yang mendukung ke Bhinekaan budaya sebagai unsur kreativitas dan sumber kekuatan bangsa.

6). Mengembangkan kesenian daerah sebagai ungkapanbudaya sehing ga mampu menampung dan menumbuhkan daya cipta para seniman, meningkatkan apresiasi seni masyarakat dan memperluas kesem patan bagi masyarakat, untuk menikmati seni budaya daerah - serta membangkitkan semangat dan gairah membangun.

7). Meningkatkan pemeliharaan dan pembinaan tradisi dan peningkatan sejarah untuk menumbuhkan semangat perjuangan dan cinta tanah air serta memelihara kelestarian budaya dan kesinambungan pembangunan daerah dan bangsa.

8). Meningkatkan usaha-usaha pembauran bangsa disegala bidang - kehidupan baik bidang ekonomi,maupun sosial budaya dalam rangka usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian.

Pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian perlu dilanjutkan dan diarahkan untuk lebih menunjang perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil-hasil pembangunan di daerah dan membantu memecahkan masalah-masalah pokok yang - dihadapi. Untuk itu perlu peningkatan kemampuan lembaga dan koordinasi antar lembaga, pengembangan jaringan informasi ilmiah termasuk kestatistikan dan penggunaan jasa komputer, komunikasi hasil-hasil teknologi tepat guna, untuk dapat menunjang perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, pemeliharaan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup.

6. Kesehatan.

a. Pembangunan kesehatan sebagai upaya mempertinggi kualitas hidup manusia diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan- termasuk gizi masyarakat dan peningkatan kesehatan lingkungan dengan mendorong makin meningkatnya peran serta masyarakat- termasuk lembaga swadaya masyarakat, serta mendorong kemandirian masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.

b. Pembangunan kesehatan terutama ditujukan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah baik di pedesaan maupun di perkotaan, dengan meningkatkan, memperluas dan mendekatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat dan dengan selalu memperhatikan aspek - aspek kemanusiaan disamping dikembangkan cara pembiayaan kesehatan oleh masyarakat sendiri. Penyelenggaraan upaya -

kesehatan .....

kesehatan dilaksanakan dengan memberikan prioritas pada upaya peningkatan (Promotif) kesehatan masyarakat. dan keluarga serta upaya pencegahan (preventif) penyakit, disamping upaya penyembuhan (Kuratif) penyakit dan pemulihan(rehabilitasif) kesehatan. Untuk itu perlu berpedoman pada sistim Kesehatan Nasional Terpadu yang dikembangkan.

c. Upaya perbaikan kesehatan rakyat ditingkatkan melalui :
- Pelayanan kesehatan ibu dan anak serta KB.
- Perbaikan gizi.
- Penyediaan air bersih, kebersihan danmkesehatan lingkungan.
- Pemberantasan penyakit menular.
-Penyuluhan kesehatan masyarakat.
-Pengendalian pengawasan penyalahgunaan obat, makanan dan bahan berbahaya bagi masyarakat, yang didukung oleh kemampuan manajemen dan hukum yang mantap, termasuk sistem informasi-kesehatan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui Puskesmas, Posyandu - serta kegiatan masyarakat lainnya.

d. Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan perlu diperhatikan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas dan - Lembaga Kesehatan lainnya dengan jalan :
- Penyediaan dan pemerataan tenaga medis, paramedis serta non medis.
- Penyediaan obat yang makin merata yang terjangkau.
- Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan.

e. Peningkatan pelayanan kesehatan secara lebih luas, terpadu , dan merata sekaligus memelihara dan mengembangkan warisan budaya mengenai cara pengobatan tradisional, dengan penggalian, penelitian, pengujian dan pengembangan mutu obat-obatan, disamping perlu terus didorong langkah-langkah pengembangan budaya tanaman obat-obatan tradisional yang secara medis dapat dipertanggung jawabkan.

7. Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Kebijaksanaan Kepndudukan dan Keluarga Berencana diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui pengendalian - pertumbuhan dan penyebaran penduduk dalam rangka peningkatan taraf hidup, kesejahteraan ibu dan anak agar dapat terwujud keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

8. Perumahan dan Pemukiman.

Pembangunan perumahan diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu dengan harga yang dapat terjangkau oleh golongan -

masyarakat .....

masyarakat. yang berpenghasilan rendah serta sesuai dengan-tata ruang dan ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Untuk itu perlu diciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, dengan usaha-usaha perbaikan lingkungan pemukiman di daerah perkotaan dan pemugaran perumahan dan lingkungan di pedesaan. Disamping itu perlu ditingkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap keberhasilan dan kesehatan lingku - ngan.

9. Kesejahteraan Sosial.

a. Pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagai salah satu upaya menuju tercapainya keadilan sosial diarahkan untuk menciptakan suasana dan kondisi sosial yang dinamis dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat, untuk mewujudkan membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan suatu-tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun - spiritual yang diliputi rasa keselamatankesusilaan, ke - amanan, ketertiban dan ketentraman lahir dan bathin serta memiliki harga diri dan kepercayaan terhadap kemampuan sendiri.

b. Pembangunan Kesejahteraan Sosial ditujukan agar tercipta sistem nilai dan sikap sosial yang mendukung usaha-usaha pembangunan sehingga terwujud kualitas hidup, partisipasi sosial, disiplin sosial dan lingkungan hidup sosial - yang menunjang pembangunan sehingga dapat meningkatkan - dan mengembangkan taraf kesejahteraan sosial keluarga dan masyarakat. Dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial diutamakan fungsi pencegahan dan pengembangan usaha - kesejahteraan sosial, disamping fungsi rehabilitasi dan fungsi penunjang.

c. Peningkatan usaha-usaha pelayanan sosial dilanjutkan untuk memberi kesempatan yang lebih luas dan merata dalam-meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anggota masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran tanggung jawab serta kemampuan setiap penduduk untuk ikut serta dalam pemba - ngunan memperbaiki dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.

d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial dengan menggali dan menggalakkan potensi perseorangan maupun organisasi sosial.

10. Peranan .....

10. Peranan Wanita.

Wanita, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insani bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria disegala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan, oleh karena itu kedudukannya dalam masyarakat dan peranan dalam pembangunan perlu ditingkatkan serta diarahkan untuk meningkatkan peran serta dan sumbangannya bagi pembangunan bangsa - sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai wanita. Peranan wanita dalam pembangunan diarahkan selaras dan serasi dengan perkembangan tanggung jawab dan peranannya dalam mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat dan sejahtera termasuk pengembangan generasi muda terutama anak dan remaja dalam rangka mendorong peran serta wanita dalam pembangunan, perlu makin ditingkatkan kesejahteraan keluarga antara lain melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai penggeraknya.

POLITIK, APARATUR PEMERINTAH, HUKUM, PENERANGAN DAN MEDIA MASSA.

1. Politik.

Dalam usaha membangun kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, dan untuk memantapkan stabilitas politik yang sehat dan dinamis di daerah, maka pembangunan politik diarahkan untuk lebih meningkatkan - usaha-usaha membudayakan ideologi Pancasila, demokrasi Pancasila dan P-4(EKA PRASETIA PANCAKARSA), sehingga perlu makin diperkuat kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum. Sehubungan dengan itu perlu didukung oleh partisipasi aktif oleh segenap aparatur Pemerintah, Dinas, Ins - tansi, Lembaga Negara dan Organisasi Kemasyarakatan serta - didorong dan dikembangkan peran serta masyarakat didalam kehidupan politik bangsa.

2. Aparatur Pemerintah.

Dalam usaha untuk meningkatkan pengabdian kesetiaan Aparatur Pemerintah kepada cita-cita perjuangan bangsa dan- negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 , pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa-

serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintah dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat.

3. Hukum.

Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan hukum, pelayanan, ketertiban dan kepastian hukum.

Pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat dapat dinikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih memberikan dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata, serta menumbuhkembangkan disiplin nasional dan rasa tanggung jawab sosial pada setiap anggota masyarakat.

Disamping itu, hukum benar-benar harus menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman dan tentram, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung stabilitas di daerah.

4. Penerangan dan Media Massa.

Pembangunan Penerangan dan Media Massa harus berdasarkan semangat dan jiwa Pancasila. Sebagai wahana informasi dan komunikasi timbal balik antara sesama warga masyarakat serta antara masyarakat dengan pemerintah, penerangan diarahkan untuk menggelorakan semangat dan perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional, memantapkan nilai-nilai budaya bangsa untuk mempertebal kepribadian Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan komunikasi sosial serta menyalurkan aspirasi dan menggairahkan masyarakat dalam pembangunan.

Penerangan dan Media Massa sebagai sasana pembangunan bangsa harus dapat membudayakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam semua segi kehidupan masyarakat dan meningkatkan kesadaran seluruh rakyat dalam berbangsa dan bernegara.

KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat diarah kan kepada pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan dan mengamankan hasil-hasilnya serta meningkatkan perlindungan kepada masyarakat terhadap berbagai bencana yang timbul. Dalam usaha bela negara perlu ditumbuhkan akan hak, kewajiban dan kehormatan untuk ikut serta dalam pembelaan negara dalam rangka perwujudan daya tangkal yang tangguh terhadap berbagai gangguan dan ancaman.

ARAH DAN KEBIJAKSANAAN TATA RUANG DAERAH

Dalam rangka penjabaran arah dan kebijaksanaan yang telah dituangkan dalam arah pembangunan jangka panjang serta untuk lebih mengetahui hakekat pembangunan daerah agar segala permasalahan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dengan mempertimbangkan lingkungan, diperlukan arah kebijaksanaan tata ruang daerah sebagai berikut :

1. Pembangunan Desa dan Kota.

   Kebijaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Dati II Kebumen diarahkan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di wilayah pedesaan didalam jaringan wilayah yang lebih luas yang perlu diwujudkan dengan menekankan pengembangan swadaya dan prakarsa masyarakat pedesaan. Sedangkan kebijaksanaan pembangunan daerah perkotaan di Kabupaten Dati II Kebumen diarahkan pada pertumbuhan kota-kota sebagai pusat-pusat pengembangan wilayah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi sosial ekonomi wilayah yang bersangkutan. Pendekatan tata ruang pedesaan dan perkotaan ini memadukan dinamika pembangunan yang tumbuh didaerah pedesaan disatu pihak dengan pengaruh pertumbuhan perkotaan dilain pihak. Dalam rangka mengurangi arus perpindahan penduduk dari desa ke Kota dan meningkatkan peran pedesaan perlu dikembangkan desa-desa sebagai pusat dinamika pembangunan.

2. Sub Wilayah Pembangunan (SWP).

   Dengan memperhatikan perkembangan dan tingkat keeratan hubungan antar kegiatan yang ada, yang bertumpu pada pengembangan sumber daya alam dan manusia dan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan daerah dalam segala hal termasuk pembiayaan, maka kebijaksanaan perwilayahan pembangunan Kabupaten Dati II Kebumen yang ditempuh ialah mempertinggi tingkat pemerataan kemudahan antar ruang dengan meningkatkan wilayah pengaruh -

dengan .....

dengan sub-sub Pusat Pembangunan melalui penetapan jumlah sub-wilayah dan pusat-pusatnya secara memadai. Perwilayahan ini berdasarkan potensi wilayah dan kedudukannya dalam struktur ekonomi wilayah dimasa datang. Adapun Sub Wilayah Pembangunan di Kabupaten Dati II Kebumen yang akan ditingkat kembangkan adalah :

a. Sub Wilayah Pembangunan I meliputi wilayah sekitar Kebumen - dengan pusatnya Kota Kebumen.
b. Sub Wilayah Pembangunan II meliputi wilayah sekitar Gombong- dengan pusatnya Kota Gombong.
c. Selain Sub-sub Wilayah Pembangunan tersebut (yang telah diterapkan pada Pelita IV). dikembangkan pula pusat-pusat lain - yang potensial untuk difungsikan sebagai pusat pengembangan- herarki berikutnya, demi keseimbangan laju pertumbuhan antar daerah dan dalam pada itu diperlukan pula untuk merintis pengembangan Sub Regional yang meliputi beberapa Kecamatan demi keterpaduan dan effisiensi pembangunan, dalam bentuk Satuan-Wilayah Pengembangan, sehingga secara keseluruhan Kabupaten-Dati II Kebumen terbagi menjadi 7(tujuh) Satuan Wilayah Pengembangan,sebagai berikut :

1). Satuan Wilayah Pengembangan I, dengan pusatnya di Kebumen sektor utama yang dikembangkan : perdagangan, industri - dan pertanian.
2). Satuan Wilayah Pengembangan II, dengan pusatnya di Kutawinangun, sektor utama yang dikembangkan : pertanian dan perdagangan.
3). Satuan Wilayah Pengembangan III, dengan pusatnya di Karanganyar, sektor utama yang dikembangkan : Pertanian dan perdagangan.
4). Satuan Wilayah Pengembangan IV, dengan pusatnya di Gombong sektor utama yang dikembangkan : pertanian, perdagangan, industri dan wisata.
5). Satuan Wilayah Pengembangan V,dengan pusatnya di Ayah, - sektor utama yang dikembangkan : perikanan, wisata, pertanian.
6). Satuan Wilayah Pengembangan VI, dengan pusatnya di Petanahan, sektor utama yang dikembangkan : pertanian, wisata dan perdagangan.
7). Satuan Wilayah Pengembangan VII, dengan pusatnya di Prembun, sektor utama yang dikembangkan : pertanian, wisata dan perdagangan.

Daerah Aliran Sungai.

Dalam .....

Dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan secara optimal serta mempertahankan fungsi-fungsi sumber alam berupa hutan, tanah dan air, sekaligus merehabilitasi yang rusak serta meningkatkan pembangunan pertanian yang dapat memberikan pengaruh pada sektor lain. Kebijaksanaan tata ruang sebagai tersebut diatas dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerataan pertumbuhan dan pemerataan tingkat pelayanan dengan mengusahakan penggunaan tanah secara lestari, optimal dan seiring, serta mengusahakan keserasian antar wilayah pembangunan Kabupaten Dati II Kebumen dengan wilayah pembangunan di Kabupaten Daerah tetangga, sehingga dicapai dayaguna dan hasilguna yang setinggi-tingginya.

D. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Sesuai Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan memperhatikan masalah-masalah pokok yang masih dihadapi maka dalam Pelita V daerah prioritas pembangunan Daerah diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi yang mengarah kepada peningkatan-taraf hidup melalui peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan kesempatan kerja dan pemerataan.

   Usaha-usaha pokok yang dilakukan dalam bidang ini ditujukan untuk :

   a. Pemenuhan kebutuhan primer yaitu pangan dengan memantapkan swasembada pangan dan pemenuhan kebutuhan primer lainnya-seperti sandang dan papan.
   b. Penciptaan dan perluasan lapangan kerja.
   c. Peningkatan peranan Dunia Usaha Nasional yang terdiri dari usaha negara, swasta dan koperasi, dalam pengembangan Ekonomi Nasional.
   d. Peningkatan pembinaan industri yang menyerap banyak tenaga kerja, terutama industri kecil dan kerajinan rakyat - serta industri pariwisata.
   e. Peningkatan ekspor non migas.
   f. Peningkatan dan penyerasian pembangunan daerah pedesaan - dan perkotaan melalui pengembangan swadaya masyarakat dan pengaturan tata ruang daerah.
   g. Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
   h. Penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana ekonomi.

2. Sejalan dengan prioritas pembangunan pada bidang ekonomi, maka pembangunan bidang-bidang diluar bidang ekonomi makin -

ditingkatkan .....

ditingkatkan sepadan dan agar saling menunjang dengan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber dayainsani dalam makna yang seluas-luasnya, termasuk meningkatkan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan - Yang Maha Esa, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.

Usaha-usaha yang akan dilaksanakan dalam bidang ini dituju kan untuk :

a. Peningkatan dan perluasan pemasyarakatan P-4
b. Peningkatan mutu dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, termasuk pemeliharaan keadaan bebas tiga buta - dan pemantapan pelaksanaan wajib belajar pada tingkat pendidikan dasar.
c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
d. Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui keluarga berencana dan transmigrasi.
e. Peningkatan pembinaan generasi muda, peranan wanita dan kese jahteraan sosial.
f. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan.
g. Pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan Aparatur Pemerintah, termasuk pembinaan disiplin.
h. Peningkatan dan pengembangan swadaya masyarakat termasuk swas ta.
i. Peningkatan kemampuan pertahanan, keamanan dan ketertiban ma syarakat.
j. Peningkatan dan pembinaan administrasi dan desentralisasi.
k. Penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana non ekonomi.

Dalam melakukan usaha-usaha pokok tersebut perlu lebih mem perhatikan daerah-daerah khusus yang relatif terbelakang, terisolir dan minus dengan sasaran untuk menyerasikan pertumbuhan - antar daerah.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka menunjang, menerapkan dan melengkapi Pembangunan Nasional dan dengan memperhatikan situasi, kondisi, potensi serta masalah-masalah yang dihadapi, maka sasaran-sasaran pembangunan masing-masing sektor dalam Repelita Kelima Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen adalah sebagai berikut :

E K O N O M I

1. Pertanian.

a. Peningkatan .....

a. Peningkatan mutu dan produksi pertanian melalui :
   1). Peningkatan penanganan pembenihan/pembibitan dengan segala aspeknya (pengadaan/penyaluran, mutu, introduksi, peran swasta/petani, pengembangan benih/bibit dan lain-lain).
   2). Peningkatan penanganan atas lahan/areal dimana komoditas yang bersangkutan dikembangkan (luas, lokasi, Sentra-sentra, jadwal/musim).
   3). Peningkatan penanganan atas sarana dan prasarana yang diperlukan seperti pupuk, obat,kredit, peralatan (pengadaan, penyaluran, volume, jenis,jadwal), jalan, saluran , tambak dan pasar ikan.
   4). Peningkatan penanganan atas gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada komoditas yang bersangkutan seperti hama, penyakit, banjir, kekeringan (pencegahan,pemberantasan dan pengendalian secara terpadu).
   5). Peningkatan penanganan pengembangan teknologi mulai dari pengolahan tanah, bibit, pengairan, pupuk, pengendalian hama/penyakit, perlakuan-perlakuan lainnya untuk keperluan suatu komoditas tertentu yang bersangkutan, serta-peningkatan dan pengembangan teknologi perikanan terutama teknologi budidaya dan penangkapan untuk menunjang - peningkatan pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya laut dan wilayah pantai.
   6). Peningkatan penanganan terhadap organisasi petani baik dalam meningkatkan peranan kelompok tani yang ada maupun meningkatkan peranan lembaga-lembaga pemerintah(LKMD) maupun non pemerintah(LSM).
   7). Peningkatan penanganan atas pemasaran dan pasca panen - dari komoditas yang bersangkutan (harga, mutu, dan perlakuan pasca panen).
   8). Peningkatan penanganan terhadap sikap dan perilaku petani lewat penyuluhan-penyuluhan dalam upaya meningkatkan mutu dan produksi usaha taninya serta penerangan pada - masyarakat untuk memperoleh dukungan sosial.
   9). Pengembangan mutu genetik ternak khususnya sapi potong dengan Inseminasi Buatan (IB).

b. Pelestarian produksi dan sumber hayati pertanian malalui :
   1). Peningkatan penanganan atas upaya-upaya konservasi lahan secara fisik.
   2). Peningkatan penanganan atas upaya pemasyarakatan/pembudidayaan

sikap dan .....

sikap dan perilaku yang selalu berorientasi pada kelestarian lahan.

3). Peningkatan penanganan secara bertahap(inventarisasi dan identifikasi) potensi-potensi wilayah terhadap pengembangan komoditi-komoditi tertentu upaya terwujudnya sentra-sentra pengembangan komoditi utama.

4). Perencanaan kapasitas daya akomodasi wilayah terhadap komoditi tertentu dalam satu periode/siklus tertentu dalam rangka tata guna lahan pertanian.

5). Pembinaan wilayah-wilayah sentra pengembangan komoditi(luas, sarana-sarana penunjang, pemasaran dan lain-lain).

6). Peningkatan penanganan atas kombinasi/komposisi cabang-cabang usaha tani diatas luas lahan tertentu (macam/jenis, tata waktu, tata letak/jarak tanam) yang ideal.

7). Peningkatan penanganan atas proses mekanisme/prosedur penerapan pola tanam yang tertib, disiplin dan efisien (wilayah, proses musyawarah, pengorganisasian petani).

8). Peningkatan penanganan sumber hayati pertanian dan kehutanan secara serasi, terpadu, dan merata dengan tetap memelihara-kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup, termasuk pemuliaan tanaman dan ternak serta pengembangan sumber daya - langka melalui usaha inventarisasi, preservasi dan konservasi.

9). Pencegahan penyakit hewan/ternak dengan intensif.

c. Pengembangan usaha tani terpadu melalui :

1). Peningkatan penanganan pengembangan cabang-cabang usaha tani yang tergolong sesuai dengan pertimbangan agroteknis ekonomi dan sosial budaya.

2). Peningkatan penerapan pengelolaan usaha tani terpadu.

3). Peningkatan peran serta pihak-pihak terkait, termasuk - usaha swasta, koperasi dan petani/nelayan dalam kegiatan sebelum, selama dan sesudah produksi termasuk pemasaran hasil produksi.

2. Pengairan.

a. Peningkatan prasarana dan sarana pengairan dengan melanjutkan pembangunan, pembuatan jaringan-jaringan baru serta-fasilitas penunjangannya.

b. Rehabilitasi, pemeliharaan dan pemanfaatan jaringan-jaringan irigasi teknis yang sudah ada diikuti dengan pengembangan jaringan tersier dan kuarter.

c. Peningkatan .....

c. Peningkatan jaringan-jaringan irigasi sedang, kecil dan sederhana menjadi jaringan irigasi teknis.
d. Peningkatan perbaikan dan pengaturan sungai untuk mengamankan jaringan-jaringan irigasi serta hasil-hasil pembangunan lainnya dari bahaya banjir.
e. Peningkatan peran serta dan prakarsa kelompok tani pemakai-air " Dharma Tirta " dalam pemeliharaan saluran, bangunan - irigasi dan pengaturan penggunaan air secara lebih efisien.
f. Peningkatan managemen pengolahan air agar pemanfaatan air - dapat efisien, efektif dan memberikan manfaat yang berdaya-guna dan berhasil guna.

3. Industri.

a. Pembangunan industri sebagai bagian dari pembangunan ekonomi jangka panjang, diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian. Untuk itu proses industrialisasi lebih dimantapkan guna-mendukung berkembangnya industri sebagai penggerak utama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan dan perluasan lapangan kerja, perluasan kesempatan berusaha serta peningkatan devisa, diupayakan pula melalui keterkaitan antara sektor industri dengan sektor lain, antar industri besar, menengah dan kecil/rumah tangga yang jumlahnya cukup besar untuk lebih dikembangkan - kemampuannya baik dalam kuantitas maupun kualitas produksi, permodalan, peralatannya, managemen dan daya saingnya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
b. Pembangunan sektor industri yang menunjang sektor pertanian akan dilanjutkan dan ditingkatkan, industri yang - mendukung peningkatan hasil produksi pertanian serta industri peralatan pertanian baik untuk penyiapan dan pengolahan lahan maupun untuk pasca panen.
c. Peningkatan industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, disamping diversifikasi akan dilaksanakan usaha-usaha memperkuat daya saing produk-produk industri di pasaran internasional, baik dalam harga maupun kualitas, yaitu melalui penurunan biaya produksi dan biaya pemasaran, perbaikan mutu,peningkatan kepercayaan konsumen dan pelayanan yang baik, terutama bagi industri kecil dan kerajinan yang potensial.

d. Pembangunan .....

d. Pembangunan industri kecil dan kerajinan ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan pengusaha dan pengrajin, dengan meningkatkan managemen, mutu dan disain hasil produksi serta meningkatkan kemampuan pengusaha dan pengrajin dalam memperluas pasaran didalam negeri maupun diluar negeri. Disamping itu juga bertujuan meningkatkan sikap mental pengusaha untuk menjadi wiraswasta yang mandiri.

e. Pengembangan sub wilayah Pusat Pertumbuhan Industri khususnya di wilayah yang potensial hendaknya didasarkan pada potensi yang dimiliki sub wilayah industri yang bersangkutan dengan lebih meningkatkan pendayagunaan sumber daya manusia, sumber daya alam serta pembangunan lainnya.

4. Pertambangan.

a. Peningkatan investasi, identifikasi dan penelitian berbagai sumber tambang dan galian.

b. Peningkatan eksplorasi berbagai bahan tambang dan galian dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.

c. Pengolahan dan pengelolaan terhadap bahan galian golongan c terus ditingkatkan, yaitu usaha-usaha penelitian, perencanaan, pengaturan dan pengawasan untuk mendapatkan manfaat yang sebesa r-besarnya bagi pembangunan daerah, perluasan kesempatan kerja dan pelestarian lingkungan hidup.

5. E n e r g i.

a. Pengembangan daya guna air bawah tanah untuk keperluan industri, pertanian dan rumah tangga, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

b. Pembangunan pembangkit tenaga listrik perlu dilanjutkan dan ditingkatkan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi (industri dan pertanian) serta kesejahteraan masyarakat baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, maka perlu terus ditingkatkan pendayagunaan prasarana dan sarana pembangkit tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan mutu yang dapat diandalkan.

c. Peningkatan perluasan jaringan transmisi dan distribusi untuk meningkatkan dan memeratakan pemanfaatan tenaga listrik secara berhasil guna dan berdayaguna, khususnya di wilayah pusat produksi pertanian (dalam arti luas) dan industri.

d. Peningkatan .....

d. Peningkatan usaha diversifikasi energi dengan pengembangan-potensi energi lain yang tersedia setempat, hemat biaya, dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.

6. Perhubungan.

a. Pemeliharaan, penunjangan, peningkatan dan pembangunan jalan diutamakan untuk jaringan jalan dipusat-pusat daerah pembangunan dan pusat-pusat produksi serta jalan yang menghubungkan daerah produksi dengan daerah pemasarannya, serta jalan untuk usaha membuka daerah minus dan terpencil, dan jalan dalam kota yang lalu lintasnya sangat padat. Keseluruhan jaringan jalan tersebut diatur sehingga dapat - mewujudkan peri kehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata dan seimbang serta mewujudkan upaya pertahanan dan keamanan.

b. Peningkatan tertib lalu lintas guna memperkecil pelanggaran-pelanggaran lalu lintas di jalan raya serta peningkatan sarana dan prasarana jasa angkutan jalan raya meliputi angkutan penumpang dan barang dalam kota, antar kota, antar daerah.

c. Peningkatan daya angkut, mutu pelayanan, dan efisiensi - angkutan agar dapat berfungsi sebagai angkutan umum penumpang dan barang yang lancar, tertib, cepat dan aman agar lebih mampu melayani kebutuhan masyarakat banyak.

d. Peningkatan pelayanan angkutan agar dapat menunjang pembangunan di berbagai sektor di daerah khususnya pada daerah pemukiman penduduk di pedalaman dan daerah terpencil.

e. Peningkatan pengembangan jasa Pos dan Giro guna melayani-kebutuhan masyarakat sampai keseluruh kecamatan, desa-desa dan daerah-daerah terpencil melalui penambahan jaringan - Pos dan Giro, sehingga pelayanan jasa Pos dan Giro akan - menjadi lebih cepat, aman dan teratur.

f. Peningkatan pembangunan telekomunikasi untuk memperluas - jaringan dan sambungan telekomunikasi, dan peningkatan mutu pelayanan. Sejalan dengan itu dikembangkan fasilitas - telekomunikasi umum yang tersebar dan menjangkau masyarakat banyak.

7. Pariwisata.

a. Peningkatan pembangunan pariwisata untuk mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi kepariwisataan - daerah menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan

memperbesar .....

memperbesar pendapatan daerah, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah serta memperkenalkan alam dan kebudayaan Indonesia terutama kebudayaan Jawa Tengah, khususnya kebudayaan asli Kebumen dengan tetap menjaga terpeliharanya kebudayaan, kepribadian bangsa dan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan pariwisata dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya, dengan berbagai usaha kepariwisataan, baik usaha-usaha kepariwisataan yang kecil, menengah , maupun yang besar.

b. Dalam rangka pembangunan pengembangan pariwisata perlu di tingkatkan sarana dan prasarana yang ada dan selalu diusahakan dilakukan kegiatan promosi didalam maupun diluar negeri pendidikan dan latihan kepariwisataan, penyediaan layanan serta penyelenggaraan pariwisata yang sebaik-baiknya.

c. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan perlu ditingkatkan melalui usaha-usaha penyuluhan dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok seni budaya dan kelompok kerajinan dan usaha pemeliharaan, pengembangan kebudayaan bangsa dengan tetap menjaga citra, kepribadian dan martabat bangsa.

d. Pendayagunaan asset wisata yang potensial di daerah serta menggalakkan berwiraswasta dari segenap lapisan masyarakat.

8. Perdagangan.

a. Peningkatan efisiensi pemasaran agar memperpendek mata rantai arus barang dan jasa antara produsen dan konsumen.

b. Peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana, serta penciptaan iklim usaha yang sehat dalam rangka peningkatan pendapatan, kesempatan kerja serta pemerataan kegiatan perdagangan bagi golongan ekonomi lemah termasuk usaha kecil tradisional dan informal untuk lebih berperan.

c. Peningkatan, penganekaragaman serta pengadaan komoditi perdagangan khususnya komoditi yang banyak dibutuhkan masyarakat, peningkatan daya saing serta upaya menjaga stabilitas harga-harga pada umumnya.

d. Peningkatan pembinaan terhadap perdagangan golongan ekonomi lemah termasuk usaha kecil tradisional dan informal terutama pembinaan terhadap managemen dan mutu pelayanan.

e. Peningkatan dan perlindungan produksi dalam negeri, dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dengan mutu dan harga yang cukup kuat bersaing diluar negeri.

9.Koperasi .....

9. Koperasi.

a. Peningkatan peranan dan fungsi Koperasi melalui peningkatan managemen, kemampuan kegiatan, baik dalam bidang kelembagaan, bidang usaha serta operasional dengan selalu mewujudkan TRISEHAT KOPERASI.

b. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Koperasi/KUD.

c. Peningkatan pembinaan dan bimbingan terhadap Pengurus Koperasi/KUD diberbagai bidang usaha antara lain pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat, perikanan, peternakan, dalam kegiatan pengadaan, pengelolaan dan pengolahan serta pemasaran produksi bidang industri, kelistrikan dan jasa pariwisata dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan tercapainya asas pemerataan.

d. Peningkatan kualitas dan partisipasi aktif para anggota Koperasi/KUD guna mempercepat terwujudnya manfaat Koperasi/KUD bagi masyarakat dan terwujudnya Koperasi/KUD yang mandiri.

e. Peningkatan dan pengembangan kerjasama antara Koperasi dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta.

10. Dunia Usaha.

a. Peningkatan iklim usaha yang merangsang tumbuh dan perkembangnya dunia usaha di daerah baik swasta, negara maupun Koperasi melalui peningkatan bimbingan teknis, pengelolaan, peningkatan perlindungan usaha terutama golongan ekonomi lemah termasuk usaha kecil tradisional dan informal serta penyediaan fasilitas baik permodalan maupun pemasaran./termasuk usaha kecil tradisional dan informal.

b. Peningkatan dunia usaha nasional meliputi juga golongan ekonomi lemah/diarahkan pada kerjasama yang serasi antara usaha besar, menengah dan kecil berdasarkan semangat kekeluargaan yang saling menunjang, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Dalam pengembangan Dunia Usaha ini harus dihindarkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

c. Peningkatan kemampuan usaha dan pemasaran dalam rangka mengembangkan kewiraswastaan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah termasuk usaha kecil tradisional dan informal.

d. Membina dan melindungi usaha tradisional terutama usaha rumah tangga yang berakar dalam kebudayaan bangsa, yang banyak menampung tenaga kerja dan memberikan kesempatan

berusaha .....

berusaha serta mampu memnuhi perkembangan pasar tanpa meninggalkan ciri-ciri khas tradisionalnya.

e. Peningkatan penanaman modal oleh masyarakat, terutama penanaman modal dalam negeri, dalam rangka menggali dan memanfaatkan kemampuan yang ada di masyarakat untuk menunjang pembangunan.

11. Tenaga Kerja.

a. Peningkatan pola perencanaan ketenagakerjaan di daerah secara terpadu dan menyeluruh dalam rangka menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya di berbagai lapangan kerja.

b. Penyempurnaan sistem informasi pasar kerja, sistem Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) didalam rangka penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja usia muda melalui mekanisme yang tepat.

c. Peningkatan pembinaan dan pelaksanaan hubungan antara pekerja dengan pengusaha dalam rangka menciptakan kesamaan pengertian mengenai hak dan kewajiban masing-masing, peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja.

d. Peningkatan mutu kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja untuk mengembangkan kewiraswastaan dan penyediaan tenaga trampil.

e. Peningkatan kegiatan padat karya didaerah pedesaan maupun didaerah perkotaan yang mempunyai tenaga pengangguran dalam jumlah besar.

12. Transmigrasi.

a. Peningkatan kemantapan penyelenggaraan transmigrasi melalui penelitian, koordinasi perencanaan antar instansi yang terkait, kerjasama antara daerah pengirim dan penerima serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan transmigrasi.

b. Peningkatan jumlah transmigrasi yang akan diberangkatkan ke daerah transmigrasi.

c. Peningkatan ketrampilan para calon transmigrasi sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan didaerah transmigrasi.

d. Penyediaan bantuan sarana produksi dan sarana sosial budaya bagi transmigrasi.

e. Peningkatan penerangan dan penyuluhan transmigrasi dalam rangka menimbulkan minat dan kesadaran masyarakat untuk bertransmigrasi, dengan lebih mendorong transmigrasi swakarsa.

13. Pengembangan .....

13. Pengembangan Daerah, Desa dan Kota.

a. Peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dengan pembangunan daerah (Regional) melalui penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara menyeluruh pada masing-masing Kecamatan dengan maksud dapat memecahkan permasalahan yang ada dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah serta dapat memanfaatkan potensi/sumber daya alam dan sumber daya manusia didaerah secara optimal guna pengembangannya lebih lanjut.

b. Peningkatan koordinasi fungsional perwilayahan dan kerjasama pembangunan antar daerah untuk lebih melancarkan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan-kegiatan pembangunan.

c. Peningkatan kelancaran perhubungan, disatu daerah maupun antar daerah dalam usaha pencapaian keserasian laju pertumbuhan antar daerah dan dimasing-masing daerah, khususnya peningkatan perhatian terhadap pembangunan daerah-daerah yang relatif terbelakang terisolir, minus serta berpenduduk padat guna peningkatan kesejahteraan.

d. Peningkatan administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka-peningkatan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah.

e. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan kesadaran serta kemampuan penduduk dalam usaha pemanfaatan serta pemeliharaan kelestarian berbagai sumber daya alam serta membina dan meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman.

f. Peningkatan dan penataan penggunaan,penguasaan,pemilikan dan pengalihan hak atas tanah serta penataan kembali batas-batas wilayah termasuk administrasi ibukota kecamatan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tertib administrasi.

g. Peningkatan dan pendayagunaan pembangunan daerah bawahan sebagai salah satu langkah untuk mempercepat penyebaran pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berpenghasilan rendah dengan menggunakan ibukota kecamatan dan desa lainnya yang potensial sebagai titik tumbuh wilayah pedesaan sekitarnya.

h. Peningkatan pembangunan pedesaan terutama melalui peningkatan prakarsa dan swakarsa masyarakat desa serta pemanfaatan secara maksimal dana-dana yang langsung maupun tidak langsung diperuntukkan bagi pembangunan pedesaan

termasuk .....

termasuk dalam hal ini pengembangan wilayah pedesaan, dengan sasaran peningkatan pendapatan golongan penduduk yang miskin potensial dan produktif melalui kegiatan peningkatan produksi, pendidikan latihan ketrampilan, perkreditan serta pengembangan kelembagaan di daerah pedesaan dibidang pemerintahan-ekonomi, sosial dan kebudayaan menuju desa Swasembada.

i. Pengembangan sumber daya alam dan wilayah sebagai penunjang pembangunan yang berkelanjutan perlu dilaksanakan dengan peningkatan dan penyempurnaan pengelolaan sumber daya tersebut secara intensif melalui peningkatan kemampuan dan kesadaran baik didalam maupun diluar sektor pemerintahan, mendorong peningkatan peran serta dunia usaha swasta dan organisasi sosial non pemerintahan/lembaga swadaya masyarakat serta peningkatan prosese koordinasi untuk memperoleh keterpaduan pengelolaan sumber daya laut dan wilayah pantai tersebut secara sektoral guna menjamin kelestarian manfaat dan fungsi sumber daya fisik, biotik dan sosial yang ada.

j. Peningkatan pusat pertumbuhan Kota Gombong khususnya yang diarahkan dalam perencanaan, fasilitas serta tata ruangnya.

14. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

a. Pengembangan sistem inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam yang ada dapat lebih diketahui, sehingga skala prioritas dapat ditentukan untuk program pembangunan selanjutnya.

b. Pengembangan pola pengelolaan lingkungan agar lebih sesuai dengan keadaan dan potensi sumber daya yang ada. Dalam upaya perwujudan pembangunan berwawasan lingkungan perlu digalakkan penggunaan teknologi tepat guna.

c. Peningkatan keterpaduan program-program pembangunan harus dilandasi telaah kelayakan baik ekonomi, teknologi , maupun kelayakan lingkungan. Khususnya bagi program-program pembangunan yang mempunyai dampak penting.

d. Peningkatan sistem pemantauan, khususnya proyek-proyek yang sudah beroperasi/berproduksi agar dampak yang timbul dapat diketahui sejak dini untuk kemudian dapat diambil tindakan pengelolaan lingkungan yang tepat.

e. Peningkatan dan Pengembangan kesadaran masyarakat maupun instansi pemerintah mengenai kebersihan kelestarian lingkungan, melalui pendidikan, kursus,bimbingan,penyuluhan dan lain-lain,kepada kelompok pelestarian sumber daya alam dan aparat pengelolaan lingkungan serta masyarakat luas.

f.Pengembangan .....

f. Pengembangan program Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu dengan sistem pengelolaan lingkungan dengan menitik beratkan pelestarian,rehabilitasi lahan kritis dan reboisasi kawasan Perhutani untuk menopang pembangunan jangka panjang.

g. Peningkatan penghijauan dalam fungsinya sebagai habitat flora dan fauna tertentu, dan sebagai upaya penanggulangan erosi maupun bahaya banjir.

h. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan serta, pengembangan kesadaran lingkungan dan mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam memelihara, melestarikan dan mengembangkan mutu lingkungan hidup, serta meningkatkan Kebumen "BERIMAN ".

i. Peningkatan peranan kelompok-kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
SOSIAL, BUDAYA.

1. Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

a. Agama.

1). Peningkatan penghayatan dan pengamalan ajaran agama-dalam kehidupan pribadi maupun hidup sosial kemasyarakatan.

2). Peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama dan Pemerintah.

3). Peningkatan pengembangan pendidikan agama disekolah-umum, kejuruan dan sekolah agama.

4). Peningkatan prasarana dan sarana bimbingan, penyuluhan dan penerangan agama.

5). Peningkatan dan pengembangan senibudaya yang berna - faskan keagamaan.

6). Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.

7). Peningkatan usaha-usaha pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah bagi umat beragama.

b. Kepercayaan terhafap Tuhan Yang Maha Esa.

1). Peningkatan sarana dan prasarana pembinaan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2). Peningkatan kerukunan intern maupun antar Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3). Peningkatan pembinaan bagi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai -

dengan .....

dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta tidak mengarah kepada pembentukan agama baru.

2. Pendidikan.

a. Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran formal, maupun pengajaran non formal/masyarakat.

b. Peningkatan daya tampung pendidikan menengah, terutama - pendidikan menengah pertama.

c. Peningkatan pendidikan Pancasila termasuk pendidikan/penyebarluasan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), Pendidikan Moral P ancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa serta unsur-unsur yang dapat memupuk,- mengembangkan dan meneruskan jiwa, semangat dan nilai - nilai kejuangan, khususnya nilai-nilai 1945, baik melalui pendidikan formal, maupun non formal.

d. Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan masyarakat / non formal terutama yang menyangkut Perpustakaan Desa dalam rangka penuntasan Bebas Tiga Buta (buta aksara,latin, buta bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar), serta berbagai ketrampilan praktis untuk dapat memperoleh pe - kerjaan ataupun menciptakan lapangan pekerjaan secara - mandiri.

e. Peningkatan partisipasi dan pengabdian Perguruan Tinggi- dan lembaga penelitian dalam kegiatan-kegiatan pembangunan daerah, khususnya pembangunan di Daerah pedesaan.

f. Peningkatan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan - organisasi kemasyarakatan lainnya khususnya dibidang pendidikan masyarakat/non formal.

g. Perluasan kesempatan belajar dan kesempatan memperoleh - ketrampilan bagi anak berasal dari keluarga kurang mampu menyandang cacat atau bertempat tinggal terpencil.

h. Pembinaan kepada anak-anak yang berprestasi untu dapat - mengembangkan kemampuannya secara maksimal.

i. Peningkatan pembinaan dan pengajaran Bahasa Jawa sebagai salah satu pelajaran wajib (muatan lokal), sekaligus menunjang pengembangan Bahasa Indonesia.

j. Peningkatan dan Pendayagunaan prasarana dan sarana pendidikan disemua jenjang pendidikan, formal maupun pendidikan non formal/masyarakat.

k. Penyempurnaan sistem pendidikan dan pengembangan berbagai jenjang kemampuan,keahlian,dan ketrampilan untuk meningkatkan produktivitas,kreativitas mutu dan efisiensi kerja bagi masyarakat dan aparatur pemerintah.

1.Peningkatan .....

l. Peningkatan kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia usaha dalam rangka menciptakan dan memenuhi kebutuhan tenaga - tenaga kerja yang cakap dan trampil di berbagai bidang, terutama bidang-bidang pertanian, industri, jasa dan perhubungan.

m. Peningkatan pendidikan kedinasan untuk memenuhi kebutuhan - aparatur pemerintah yang produktif,kreatif,inovatif,efektif, dan efisien dalam menjalankan tugas dan tanggung jawanya.

n. Peningkatan pendidikan dan pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional, sehingga menjangkau semua lembaga pendidikan dan masyarakat luas diseluruh daerah.

o. Peningkatan pembinaan dan pendidikan tenaga kependidikan serta pembinaan kesejahteraannya.

3. Generasi Muda dan Olah Raga.

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai jalur dan wadah pembinaan generasi muda.

b. Peningkatan usaha-usaha penanggulangan pengaruh kebudayaan yang negatif terhadap generasi muda.

c. Peningkatan partisipasi, rasa memiliki dan rasa ikut - bertanggung jawab atas pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

d. Peningkatan pendidikan baik formal maupun non formal - yang dapat memberi bekal untuk menciptakan dan memenuhi kebutuhan/sebagai lapangan kerja. /berbagai

e. Peningkatan dan pembinaan wadah-wadah generasi muda,antara lain Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Pramuka, KNPI, Karang Taruna, Palang Merah Remaja secara terarah dan terpadu.

f. Peningkatan dan pengadaan prasarana dan sarana pembinaan generasi muda antara lain dibidang kepramukaan,olah raga,kesenian, kepariwisataan, lingkungan hidup, keagamaan dan usaha-usaha produktif.

g. Peningkatan pendidikan jasmani dan olah raga dilingkungan sekolah dan di masyarakat serta dilingkungan kehidupan dalam rangka memasyarakatkan olah raga dan mengolah ragakan masyarakat.

h. Peningkatan prestasi berbagai cabang olah raga dalam - rangka meningkatkan prestasi dan prestise Kabupaten - Dati II Kebumen di tingkat daerah dan Nasional.

4. Kebudayaan.

a. Peningkatan pembinaan Bahasa Indonesia,serta penggunaannya secara tepat,baik dan benar dilingkungan pendidikan

formal .....

formal maupun non formal dan di Dinas/Instansi.

b. Peningkatan pengkajian dan pembinaan bahasa daerah (Bahasa Jawa) sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan dan di kembangkan.

c. Pembinaan dan pengembangan kesenian daerah, pelestarian kesenian tradisional serta peningkatan aspirasi dan kreativitas seni.

d. Penyediaan, peningkatan prasarana dan sarana pembinaan kesenian dan kebudayaan daerah.

e. Peningkatan peran serta masyarakat untuk membina dan melestarikan kesenian daerah.

f. Peningkatan pelestarian pendayagunaan sejarah dan kebudayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

g. Peningkatan minat, kebiasaan dan kegemaran membaca di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat.

h. Pengadaan inventarisasi, dokumentasi sejarah dan nilai-nilai tradisional serta kebudayaan daerah.

i. Peningkatan usaha-usaha pembauran bangsa di segala bidang - kehidupan, baik dibidang ekonomi,maupun sosial budaya guna- memperkokoh persatuan dan kasatuan bangsa serta memantapkan ketahanan Nasional.

5. Ilmu Prngetahuan, Teknologi dan Penelitian.

a. Peningkatan kegiatan penelitian, khususnya penelitian yang dalam waktu singkat dapat membantu memecahkan masalah-masalah pokok yang dihadapi dan belum sepenuhnya diselesaikan- dalam Pelita yang lalu seperti kependudukan,keseimbangan , dan pelestarian alam, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi,serta laju pertumbuhan antar wilayah.

b. Peningkatan kemampuan Lembaga-Lembaga Penelitian,Organisasi-organisasi Profesi serta koordinasi antar Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian di dalam - maupun di luar Perguruan Tinggi dilain daerah agar lebih - meningkatkan daya guna dan partisipasinya dalam menunjang pembangunan di Daerah.

c. Peningkatan iklim yang menggairahkan kegiatan dan penelitian dan pengembangan dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan hasil-hasil penelitian untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

d. Peningkatan .....

d. Peningkatan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi tepat - guna,termasuk teknologi tradisional, yang dapat menunjang - perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan, pemeliharaan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup.

e. Peningkatan pemanfaatan teknologi yang bersih limbah dilakukan dengan lebih memperhatikan dampak sosial ekonomi dan kelestarian lingkungan masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan.

f. Peningkatan dan penyempurnaan jaringan informasi ilmiah,kestatistikan, penggunaan jasa komputer dan komunikasi hasil - hasil penelitian dalam rangka menunjang pelaksanaan pemba - ngunan di Daerah Kabupaten Dati II Kebumen.

6. Kesehatan.

a. Peningkatan koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan dibidang kesehatan melalui kerja sama lintas sektoral di semua bidang yang berkaitan dengan kesehatan serta peran serta masyarakat pada semua tingkatan.

b. Peningkatan penyuluhan kesehatan perlu diperluas untuk menumbuhkan dan memelihara kesadaran serta membudayakan perilaku hidup sehat diseluruh lapisan masyarakat melalui pu - sat-pusat kesehatan masyarakat, pos-pos pelayanan terpadu serta berbagai kegiatan masyarakat lainnya.

c. Peningkatan kesehatan lingkungan ditujukan kepada perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan melalui peningkatan penyediaan air bersih dan peningkatan sanitasi dasar serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta kemerosotan lingkungan fisik dan biologis termasuk berbagai akibat sampingan terhadap kesehatan.

d. Peningkatan status gizi masyarakat untuk mengatasi masalah gizi utama dan dilaksanakan secara bertahap serasi dengan- upaya pengadaan pangan yang bergizi merata dan terjangkau- oleh masyarakat.

e. Peningkatan perbaikan kesehatan rakyat melalui pemberantasan penyakit menular, perlindungan rakyat terhadap bahaya- narkotik dan penyalahgunaan obat, makanan dan minuman, serta perluasan cakupan pelayanan kesehatan dan imunisasi untuk kesejahteraan ibu dan anak, termasuk Keluarga Berencana.

f. Peningkatan pelayanan kesehatan perlu terus ditingkatkan - melalui peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan rumah sakit,lembaga-lembaga pemulihan kesehatan pusat-pusat

kesehatan .....

kesehatan masyarakat serta Lembaga kesehatan lainnya termasuk swasta.

g. Peningkatan mutu dan jumlah tenaga kesehatan yang profesional melalui pendidikan dan latihan dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehatan seluruh rakyat disamping upaya peningkatan jumlah dan kemampuan kader terlatih dibidang kesehatan. Disamping itu perlu dikembangkan cara pembiayaan kesehatan oleh masyarakat sendiri berdasarkan prinsip asuransi.

7. Kependudukan dan Keluarga Berencana.

a. Peningkatan koordinasi penanganan masalah kependudukan secara terpadu antar instansi/lembaga yang terkait dengan mengikutsertakan masyarakat.

b. Peningkatan penerangan dan pendidikan kependudukan pada setiap tingkat pendidikan dan bagi seluruh lapisan masyarakat.

c. Peningkatan administrasi kependudukan sampai pada tingkat organisasi pemerintahan yang terendah.

d. Peningkatan program Keluarga Berencana untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera yang pelaksanaannya atas dasar kesadaran dan secara sukarela dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

e. Peningkatan jangkauan pelayanan dan pembinaan peserta Keluarga Berencana dengan mendorong peranan dan tanggung jawab masyarakat serta memelihara dan meningkatkan jumlah peserta Keluarga Berencana Lestari, mantap dan mandiri.

8. Perumahan dan Pemukiman.

a. Peningkatan pembangunan perumahan terutama perumahan yang dapat dijangkau oleh golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui pengembangan kegiatan usaha swasta, Koperasi, Pemerintah dan masyarakat.

b. Peningkatan pengembangan perumahan dan pemukiman secara terarah dan terpadu dengan memperhatikan jumlah penduduk dan penyebarannya tata guna tanah baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, pembiayaan, perluasan kesempatan kerja, kesehatan lingkungan, fasilitas sosial yang dibutuhkan, produksi bahan bangunan setempat dan keserasiannya dengan lingkungan pemukiman serta pembangunan daerah.

c. Peningkatan perbaikan Kesehatan Lingkungan pemukiman di kota kota untuk meningkatkan mutu kehidupan golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan mendorong prakarsa serta peranan masyarakat.

d. Peningkatan .....

d. Peningkatan peranan lembaga Keuangan (Perbankan) yang melayani pembangunan perumahan sehingga dapat mendorong terhimpun modal yang memungkinkan pembiayaan pembangunan perumahan dalam jumlah yang besar dan dengan harga yang terjangkau - rakyat banyak.

e. Peningkatan produksi bahan-bahan bangunan yang murah memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, yang terbuat dari bahan dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan lingkungan dan penyempurnaan serta pengembangan sistem pemasaran.

f. Peningkatan penyuluhan mengenai teknik pembangunan serta pemugaran perumahan dan lingkungan desa untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap keberhasilan dan kesehatan lingkungan.

g. Peningkatan penyediaan air bersih di daerah perkotaan dan - pedesaan guna memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan disertai, dengan pe - nyempurnaan cara pengelolaan air bersih melalui peningka - tan status BPAM menjadi PDAM.

9. Kesejahteraan Sosial.

a. Peningkatan koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan upaya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu melalui kerjasama lintas sektoral dengan bidang lain yang terkait. dengan disertai peningkatan peran serta masyarakat.

b. Peningkatan penyuluhan dan bimbingan sosial untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta meningkatkan- kemampuan setiap penduduk untuk memperbaiki dan meningkat - kan taraf hidup kesejahteraan sosial.

c. Peningkatan dan pengembangan kemampuan,peranan,organisasi - sosial dan lembaga-lembaga sosial yang bergerak dibidang - usaha kesejahteraan sosial, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik serta menjangkau masyarakat yang le - bih luas.

d. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan dan santunan sosial kepada penyandang cacat, fakir-miskin,anak-anak terlantar, yatim piatu,lanjut usia yang kurang beruntung, korban bencana alam dan musibah lainnya serta rehabilitasi sosial bagi mereka yang tersesat, baik me - lalui Panti maupun non Panti.

e. Peningkatan usaha-usaha untuk membantu para penyandang cacat agar dapat memperoleh kesempatan kerja sesuai dengan kemanpuannya.

f. Peningkatan .....

f. Peningkatan pembinaan dan penyantunan cacat veteran dan pejuangan kemerdekaan sesuai dengan dharma baktinya kepada bangsa dan negara.

g. Peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui perluasan jangkauan, peningkatan mutu dan jumlah panti-panti sosial serta peningkatan dan pengembangan kegiatan swadaya sosial masyarakat.

h. Peningkatan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial dengan menciptakan iklim yang dapat mendorong kegairahan dan kesediaan masyarakat untuk menjadi pekerja-pekerja sosial.

10. Peranan Wanita.

a. Peningkatan peranan dan tanggung jawab wanita dalam pembangunan dengan meningkatkan kemampuannya melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan diberbagai bidang sesuai dengan kebutuhan.

b. Peningkatan dan pengembangan kegiatan wanita dalam mewujudkan,membina dan mengembangkan keluarga sehat dan sejahtera, termasuk pembinaan generasi muda,anak-anak remaja dan anak-anak dibawah lima tahun.

c. Peningkatan peran serta wanita dalam pembangunan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai penggeraknya.

d. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan peranan wanita dilakukan secara terpadu melalui koordinasi dan kerjasama lintas-sektoral disemua bidang yang berkaitan dengan upaya peningkatan peranan wanita pada semua tingkatan.

POLITIK,APARATUR PEMERINTAH,HUKUM,PENERANGAN DAN MEDIA MASSA.

1. Politik.

a. Peningkatan dan perluasan usaha-usaha pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) untuk lebih memantapkan kehidupan politik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, melalui pendidikan, penataran , keteladanan, serta kegiatan Pemasyarakatan P-4 yang lain di semua lapisan masyarakat.

b. Peningkatan pendidikan politik masyarakat agar rakyat makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan

makin mampu .....

makin mampu ikut berperan secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk lebih memperkokoh persatuan bangsa.

c. Peningkatan peranan secara lebih efektif kepada organisasi - kekuatan sosial politik peserta Pemilihan Umum yang terdiri- dari Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai - Persatuan Pembangunan dalam rangka kegiatan pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1992.

d. Peningkatan kegiatan dan peranan kekuatan-kekuatan sosial politik, khususnya Partai Politik dan Golongan Karya dalam meningkatkan kemandirian dan kemampuannya untuk berperan dalam kehidupan politik, baik dalam melaksanakan pendidikan politik maupun dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berorientasi kepada program pembangunan. Disamping itu perlu dikembangkan iklim yang sehat bagi pelaksanaan demokrasi Pancasila di dalam masing-masing Organisasi Sosial Politik.

e. Peningkatan kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat, untuk mengungkapkan aspirasi dan kepentingannya dan bagi kekuatan sosial politik, untuk menanmpung serta menyalurkan sehingga- berkembang komunikasi politik timbal balik antar masyarakat serta antar masyarakat dengan lembaga perwakilan rakyat dan dengan pemerintah. Untuk itu perlu dipelihara dan ditingkatkan sikap keterbukaan sebagai pendu kung terselenggaranya - komunikasi tersebut.

f. Peningkatan peranan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan bidang kegiatan, profesi, fungsi serta agama dan kepercayaan- terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu perlu diciptakan - iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu malaksanakan fungsinya sebagai sarana bagi masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi, serta berpartisipasi dalam pembangunan.

g. Pemantapan fungsi dan peningkatan peranan wadah-wadah penyalur pendapat masyarakat terutama di pedesaan dalam rangka - peningkatan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dalam pembangunan, termasuk pembinaan iklim dan peluang kepada generasi muda untuk mantinya lebih berperan di masa depan.

2. Aparatur Pemerintah,

a. Peningkatan pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan Aparatur Pemerintah di Daerah yang mencakup segi mental -

organisasi, ketata laksanaan,kepegawaian dan personil serta-sarana dan prasarana kerja,termasuk perusahaan-perusahaan milik daerah selaku aparatur perekonomian daerah, perlu dilakukan secara terus menerus sehingga dapat meningkatkan kemampuan, pengabdian dan keteladanannya. Sejalan dengan itu aparatur pemerintah harus dicegah dari sifat-sifat kejenuhan sehingga makin mampu melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta tanggap terhadap pandangan-pandangan dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat.

b. Penertiban Aparatur Pemerintah perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan, terutama dalam menanggulangi masalah korupsi , penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, pemungutan liar serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang menghambat pelaksanaan pembangunan serta merusak kewibawaan Aparatur Pemerintah. Untuk itu pengawasan dan langkah-langkah penindakannya perlu ditingkatkan secara lebih terpadu.

c. Peningkatan hubungan fungsional antar Legislatif dan Eksekutif, dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, peningkatan koordinasi dan kerja sama Aparatur Pemerintah baik Aparatur-Pusat maupun Aparatur Daerah serta pemantapan hubungan Pemerintah Daerah Tingkat I dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Kebumen dalam rangka memperlancar tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang tebih terrencana dan terpadu. Dalam hal ini kemajuan pembangunan daerah perlu diupayakan dengan langkah-langkah yang mengarah kepada terciptanya pelaksanaan otonomi daerah yang lebih nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

d. Peningkatan kemampuan Aparatur Pemerintah yang ada diwilayah kecamatan agar dapat melaksanakan penyelenggaraan fungsi pemerintah secara efisien dan efektif.

e. Peningkatan Kemampuan pemerintahan desa dan Kelurahan, agar makin mampu melayani masyarakat, menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menyelenggarakan administrasi desa yang makin tertib berdayaguna dan berhasilguna.

f. Peningkatan fungsi dan peranan perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan pengawasan yang dilandasi oleh disiplin dan semangat pembangunan yang tinggi sehingga mencapai tujuan pembangunan yang berdayaguna dan berhasilguna.

3. Hukum .....

3. Hukum.

a. Peningkatan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu serta penyusunan perundang-undangan Daerah baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan daerah diberbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Untuk itu perlu lebih dimantapkan-penanganan administrasi hukum, sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum, penanganan Peraturan Daerah, serta - peningkatan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan bidang hukum.

b. Dalam rangka peningkatan penegakan hukum, kedudukan dan - peranan badan-badan penegak hukum perlu terus dimantapkan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, serta-terus ditingkatkan kemampuan dan kewibawaannya dan dibina sikap, perilaku dan keteladanan para penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas dan adil.

c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum masyarakat yang tinggi sehingga setiap anggauta masyarakat menyadari dan menghayati hak kewajibannya sebagai warga negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan - dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum serta terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.

d. Peningkatan pelayanan konsultasi hukum dan bantuan hukum kepada anggauta masyarakat yang kurang mampu, agar dapat-dicapai pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.

e. Peningkatan langkah-langkah untuk mengembangkan dan menegakkan hak dan kewajiban warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

4. Penerangan dan Media Massa.

a. Peningkatan perluasan jangkauan penerangan sampai kepedesaan dalam rangka pemerataan informasi dengan memanfaatkan berbagai media penerangan seperti pers,radio,televisi, - film,video, media tradisional(tatap muka),pameran pembangunan,pertunjukan rakyat,komunikatif dengan memperhatikan kondisi dan kebinekaan masyarakat serta kepribadian bangsa demikian pula perlu dilanjutkan dan ditingkatkan penyebaran koran masuk desa dan pemberitaan pembangunan untuk desa.

b.Peningkatan .....

b. Peningkatan peranan pers dalam pembangunan dalam rangka pembangunan pers yang sehat, bebas dan bertanggung jawab, pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif dan edukatif, melakukan kontrol sosial yang - kontruktif, menyalurkan aspirasi rakyat, dan memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini perlu terus dikembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah- dan masyarakat.

c. Peningkatan kemampuan forum komunikasi pedesaan dalam pembangunan, dalam wadah Klompencapir dan Posyandu dipedesaan , sarana-prasarana dan media massa termasuk pendidikan dan latihan agar kegiatan penerangan dan peranan media massa dapat makin berdayaguna dan berhasilguna.

d. Peningkatan usaha-usaha penerangan dan peranan media massa untuk menciptakan situasi dan kondisi yang mantap dibidang idiologi, politik, ekonomi,sosial budaya serta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga dapat lebih menggairahkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.

e. Peningkatan usaha-usaha dalam memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4).

f. Peningkatan penerangan secara terpadu dan peranan media massa untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1992.

KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

1. Peningkatan pembinaan pertahanan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui usaha-usaha pemantapan sistem keamanan umum dan ketentraman masyarakat yang bersifat swakarsa dengan berintikan alat negara, aparat keamanan, penegak hukum dengan mengutamakan usaha-usaha pencegahan dan penangkalan, sehingga terbina kekuatan pertahanan keamanan - rakyat semesta yang ampuh dengan ketahanan mental yang tangguh.
2. Peningkatan pembinaan terhadap pertahanan sipil sebagai salah satu unsur pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, untuk kelancaram penyelenggaraan pertahanan sipil di daerah secara berdayaguna dan berhasilguna.
3. Peningkatan usaha-usaha kemanunggalan ABRI dan rakyat melalui operasi Bhakti ABRI, dalam rangka melaksanakan fungsi- sebagai kekuatan sosial politik di daerah.

4.Peningkatan .....

4. Peningkatan usaha-usaha untuk mengamankan pelaksanaan ketetapan-ketetapan MPR RI tahun 1988.
5. Peningkatan kewaspadaan terhadap bahaya laten komuni de ngan usaha-usaha pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap bekas G.30.S/PKI, serta peningkatan kewaspadaan terhadap - subversi, golongan ekstrim dan bentuk-bentuk gangguan kam - tibmas lainnya.

F. STRATEGI PEMBIAYAAN

1. U m u m.

Pembangunan Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan yang bermakna menunjang dan merupakan penerapan serta - pelengkap dari pelaksanaan pembangunan Nasional, harus berjalan serasi dan selaras dengan proses Pembangunan Nasional tersebut. Untuk itu pembangunan Daerah harus merupakan usaha terciptanya kondisi yang memungkinkan pembangunan Bangsa dapat berjalan lancar.

Keseimbangan pembangunan akan tetap diusahakan baik keseimbangan pembangunan antar Daerah maupun antar sektor keseimbangan pembangunan tersebut harus mendukung terciptanya - strukturekonomi yang kuat yang mendasarkan pada keseimbangan antara industri dan pertanian.

Disamping itu ikhtiar pembangunan yang kita lakukan sudah barang tentu berhulu dan bermuara pada Trilogi Pembangunan, sehingga pembangunan tersebut benar-benar dapat mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan, dalam suasana perikehidupan bangsa yang stabil dan dinamis.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan di - Daerah diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana dari Pemerintah dan masyarakat, guna mendukung pembiayaan pembangunan yang senantiasa meningkat, maka sasaran yang perlu dicapai adalah usaha pemekaran basis pendapatan daerah, baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber dana yang ada, maupun dengan penggalian sumber-sumber pendapatan baru yang tidak-bertentangan dengan kepentingan nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk maksud tersebut maka sangat diperlukan peningkatan kemampuan dan perbaikan Aparatur Pemerintah yang menyangkut jumlah, mutu dan

jenis-jenis .....

jenis-jenis keahlihan dan ketrampilan, baik Aparatur Otonom maupun Aparatur vertikal, guna mewujudkan asas otonomi daerah secara lebih nyata dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan itu maka untuk pembiayaan pembangunan di daerah perlu disediakan dana dalam jumlah yang memadai, yang penggunaannya ditujukan untuk mencapai sasaran pokok sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga dapat menghasilkan pengaruh komulatif yang berhasilguna dan berdayaguna secara maksimal dan sekaligus merupakan usaha menciptakan iklim yang memungkinkan investasi swasta dapat berkembang.

2. Kebijaksanaan Pembiayaan Pembangunan Daerah.

a. Anggaran Pemerintah.

1). Dalam Negeri.

Dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pembiayaan - yang berasal dari anggaran pemerintah yang ada ditempuh kebijaksanaan sesuai dengan sifat masing-masing - sumber pembiayaan, baik yang sepenuhnya dikuasai daerah maupun yang berada diluar kekuasaan daerah.

a). Sumber Pembiayaan dari Pemerintah Pusat.

Sumber pembiayaan dari Pemerintah Pusat dalam rangka perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah - baik melalui program dan Proyek Sektoral maupun - melalui berbagai jenis program bantuan pembangunan)(program-program Inpers) pada dasarnya merupakan sumber pembiayaan yang berada diluar pengusaan - daerah. Dalam hal ini kebijaksanaan peningkatan - pembiayaan Pembangunan Daerah diarahkan untuk :

(1) Peningkatan Perencanaan program/proyek yang - lebih mengarah pada pemecahan masalah pokok - dan sekaligus berakibat menunjang dan melengkapi program Pembangunan Nasional di Daerah.

(2) Peningkatan peranan Daerah dalam pengendalian pelaksanaan program/proyek sektoral sehingga menjamin pencapaian hasil pembangunan secara-optimal sebagai akibat adanya keterpaduan antara prioritas Daerah dan kepentingan Nasional.

b). Sumber pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah - Sendiri Pada dasarnya sumber pembiayaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri -

merupakan .....

merupakan sumber yang sepenuhnya dalam penguasaan Daerah dengan kebijaksanaan yang lebih diarahkan untuk meningkatkan sumbangan dari masing-masing sumber pembiayaan tersebut dengan cara in - tensifikasi dan ekstensifikasi yang terus menerus melalui :

(1) Kebijaksanaan dalam bidang perpajakan Daerah dan pengendalian sumber-sumber penerimaan daerah yang diarahkan kepa - da intensifikasi masing-masing jenis pungutan serta perluasan obyek pajak dan Retribusi Daerah dengan tetap berpegang teguh pada asas pemerataan, efisien dan kelayakan besarnya beban pungutan.

(2) Kebijaksanaan yang menyangkut Perusahaan Daerah dan unit-unit usaha milik Daerah lainnya yang diarahkan pada pemantapan kedudukan dan fungsinya melalui peningkatan usaha - usaha ekonomi dengan memperhatikan tata hubungan yang selaras dan serasi dengan usaha masyarakat.

(3) Kebijaksanaan mengenai tabungan baik tabungan Pemerintah-maupun tabungan masyarakat, yang diarahkan pada usaha peningkatan tabungan tersebut, untuk selanjutnya digunakan-bagi kepentingan pembangunan.

Penerimaan anggaran dari sumber Daerah sendiri untuk pembiayaan pembangunan terus ditingkatkan, sehingga secara bertahap per - bandingan kemampuan anggaran Daerah terhadap anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat akan meningkat. Demikian pula te - tap diusahakan peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berimbang dan dinamis. Kebijaksanaan tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dibarengi keuangan, harta-benda dan semua investasi milik Pemerintah Daerah. Selain itu juga harus menjamin pelaksanaan pembangunan itu sendiri serta-memperlihatkandengan jelas adanya keserasian antara tahap pe - laksanaan program/proyek dan tahap-tahap realisasi pembiayaan yang dibutuhkan.

2. Luar Negeri.

Dalam usaha memperlancar pelaksanaan pembangunan di Daerah, sumber-sumber pembiayaan dari Luar Negeri merupakan - sumber pelengkap bagi sumber pembiayaan dalam negeri. Sumber-sumber ini berupa bantuan asing melalui Pemerintah-Pusat kepada Pemerintah Daerah baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman yang syarat-syaratnya tidak memberatkan dan - dalam batas kemampuan untuk pembayaran kembali.

Demikian .....

Demikian pula bantuan asing kepada Pemerintah Daerah dapat berupa bantuan langsung (Proyek) dari Lembaga Pemerintah maupun dari organisasi non Pemerintah. Untuk itu dalam Pelita V akan-dimanfaatkan usaha-usaha untuk mendayagunakan sumber pembiayaan luar negeri guna meningkatkan kualitas pembangunan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan sumber daya manusia yang lebih berkualitas serta peningkatan usaha usaha rekayasa sosial yang mendorong kemandirian, disesuaikan-dengan prioritas dan masalah yang dihadapi di Daerah.

b. Non Anggaran Pemerintah.

1). Dalam Negeri.

Sumber pembiayaan non anggaran Pemerintah yang berasal dari dalam negeri berupa :

a). Sumber pembiayaan yang berasal dari Dunia Usaha.

Sumber pembiayaan yang berasal dari dunia usaha terdiri dari usaha negara, swasta dan koperasi, baik yang berupa investasi langsung maupun tabungan masyarakat serta kredit perbankan terutama diarahkan untuk membiayai sektor-sektor usaha yang mendapatkan prioritas dan yang bersifat cepat menghasilkan .

Guna lebih meningkatkan peran serta dunia usaha dalam-melaksanakan investasi-investasi produktif, maka bersamaan dengan itu perlu ditingkatkan usaha penciptaan - iklim usaha yang merangsang dan mendorong peran serta-dunia usaha tersebut termasuk yang dengan ataupun tanpa fasilitas. Penciptaan iklim usaha dan iklim investasi yang merangsang ini dilengkapi pula dengan upaya-upaya deregulasi dan debirokratisasi serta tersedianya informasi mengenai peluang investasi dan peluang usaha - dalam bentuk profil daerah, profil investasi dan pro - fil proyek serta pencadangan areal/lahan untuk wilayah wilayah (zona) industri, termasuk zona pengolahan.

Dalam pada itu penggalakan investasi melalui promosi - juga senantiasa ditingkatkan guna memanfaatkan dengan sebaik-baiknya situasi dan peluang internasional pada waktu dilakukan terhadap peningkatan pembiayaan usaha golongan ekonomi lemah termasuk usaha kecil,tradisio - nal dan informal serta petani dan nelayan,melalui pe - ningkatan pelayanan kredit perbankan baik jumlah,mutu pelayanan maupun kelembagaannya.

b). Sumber .....

b). Sumber pembiayaan yang berasal dari Swadaya Masyarakat. Usaha meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan Daerah merupakan suatu keharusan, untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan teknis dan pembinaan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan - dan terwujudnya kreativitas dan oto aktivitas di kalangan-masyarakat. Dalam rangka itu semua, maka perlu peningkatan sumber dana dari masyarakat, dengan demikian peran serta - masyarakat serta aktif dalam pembangunan dapat terwujud khususnya dengan lebih mendayagunakan instansi keuangan/ lembaga perkreditan di Daerah, seperti misalnya Badan Kredit Kecamatan dan lain-lainnya dengan sebaik-baiknya.

2). Luar Negeri.

Sumber-sumber ini dapat berupa Penanaman Modal Asing(PMA) yang diarahkan pada sektor-sektor yang menghasilkan barang dan jasa yang sangat diperlukan, dapat memperluas ekspor - memerlukan modal investasi yang besar dan teknologi yang - cukup tinggi serta tidak akan membahayakan kepentingan - ekonomi dan keamanan Nasional dan tidak akan menghambat - perkembangan perusahaan Nasional Untuk itu perlu terus dikembangkan iklim investasi yang menggairahkan antara lain melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan kepastian berusaha, kelancaran pelayanan serta penyediaan prasarana-dan sarana yang memadai.

BAB IV
P E N U T U P

A. PELAKSANAAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Dati II Kebumen ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Kebumen yang setiap 5 tahun sekali akan disusun kembali dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di segala bidang.

Pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Dati II Kebumen dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dati II Kebumen yang dituangkan dalam Repelita Kelima Daerah (1989/1990 - 1993/1994) dengan mendengarkan dan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Kabupaten Dati II Kebumen.

Pembangunan .....

Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah Kabupaten Dati II Kebumen merupakan tahap akhir dari Pembangunan Daerah Jangka Panjang-25 tahun pertama, diharapkan dapat menunjang pencapaian sasaran-sasaran Pembangunan Jangka Panjang pertama dan dapat memantapkan landasan yang kokoh kuat memasuki tahapan Pembangunan-Jangka Panjang 25 tahun kedua.

Pelaksanaan kebijaksanaan serta usaha pembangunan untuk setiap tahun dituangkan dalam Rencana Operasional dalam bentuk Rencana Pembangunan (Program-Program) Tahunan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta kebijaksanaan Pemerintah Daerah lainnya, dengan tetap memperhatikan keberhasilan,keterbukaan,keterpaduan,keserasian dan keseimbangan pembangunan diberbagai bidang. Dalam peningkatan tanggung jawab keuangan negara, seluruh aparat pengawasan yang ada wajib meningkatkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam perundang undangan.

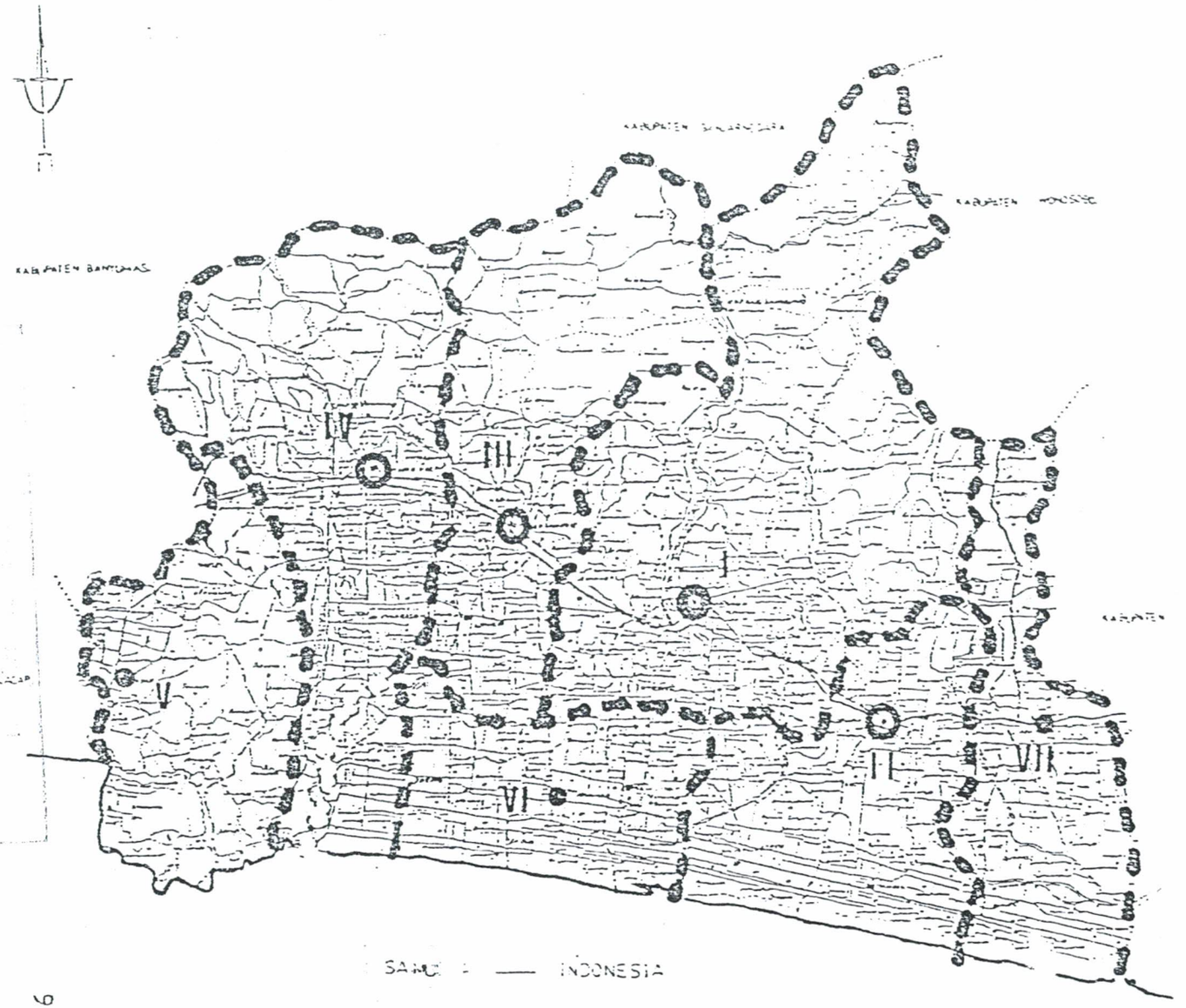
B. PERSYARATAN.

Keberhasilan usaha-usaha pembangunan di Kabupaten Dati II Kebumen pada akhirnya tergantung partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat serta sikap mental, tekad, dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara baik Aparat-Pemerintah Pusat maupun Daerah dan seluruh rakyat Kabupaten-Dati II Kebumen, dengan meningkatkan pengelolaan pembangunan yang mencakup perencanaan,pelaksanaan,pengendalian dan pengawasan.

Hasil Pembangunan harus dapat dinikmati secara makin merata-dan adil oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan sosial sehingga tercipta wilayah yang berketahanan dan sekaligus memperkokoh ketahanan Nasional dan pada gilirannya akan meratakan jalan bagi generasi yang akan datang dalam mencapai masyarakat maju,sejahtera,adil,makmur dan lestari berdasarkan Pancasila.

KABUPATEN DATI II
KEBUMEN

PETA : SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN.

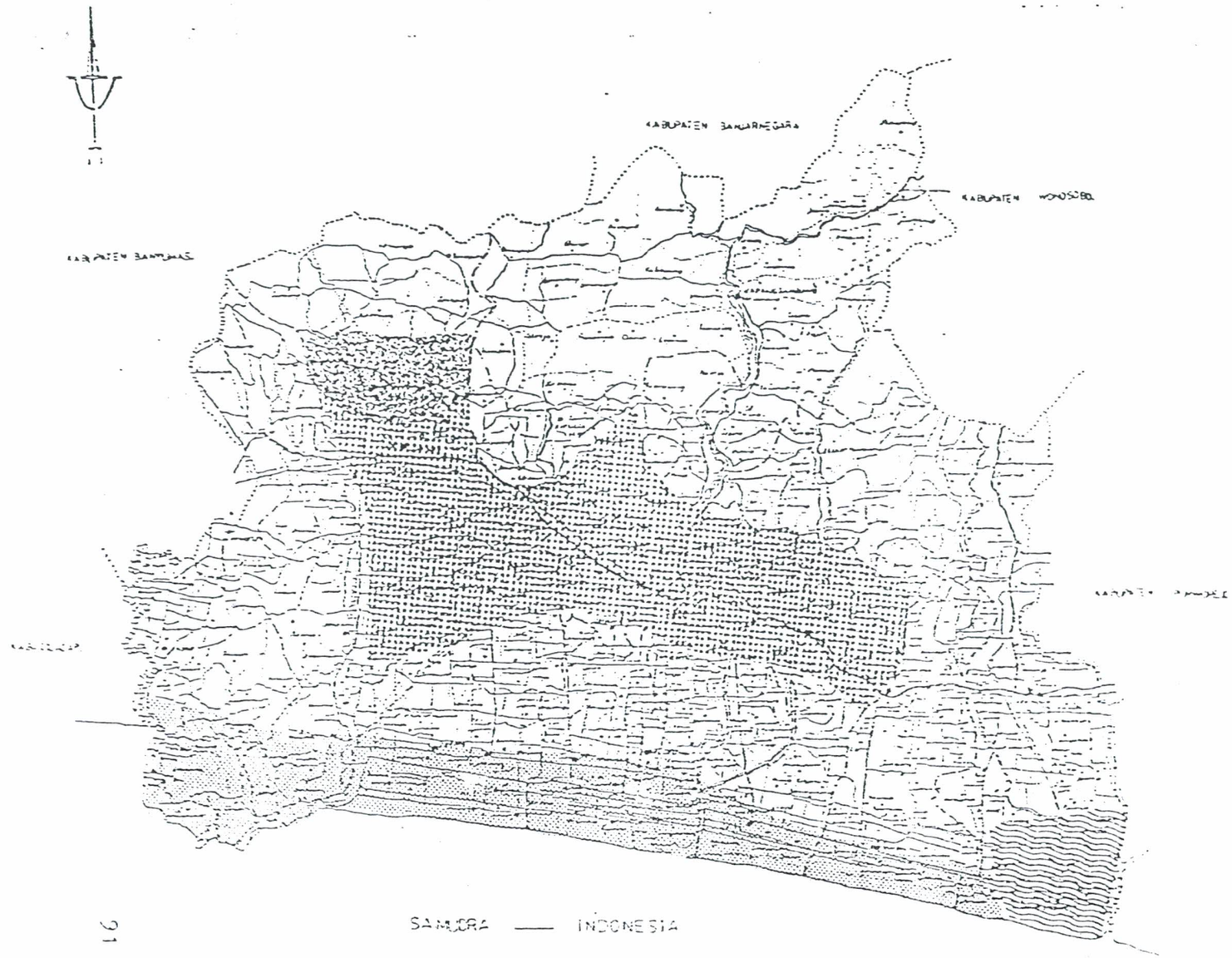


KETERANGAN :

- Batas Satuan Wilayah Pengembangan (SWP)
- Pusat SWP
- Pusat SWP Hirarki I
- Pusat SWP Hirarki II
- Pusat SWP Hirarki III

KABUPATEN DATI II
K E B U M E N

PETA : WILAYAH PENGEMBANGAN
SEKTOR POTENSIAL.



KETERANGAN :

- Wilayah Pengembangan Industri.
- Wilayah Pengembangan Pertanian
- Wilayah Pengembangan Wisata
- Wilayah Pengembangan Pantai dan Wisata
- Wilayah Banjir

Sumber : PIPR Jateng-DIY
1982-